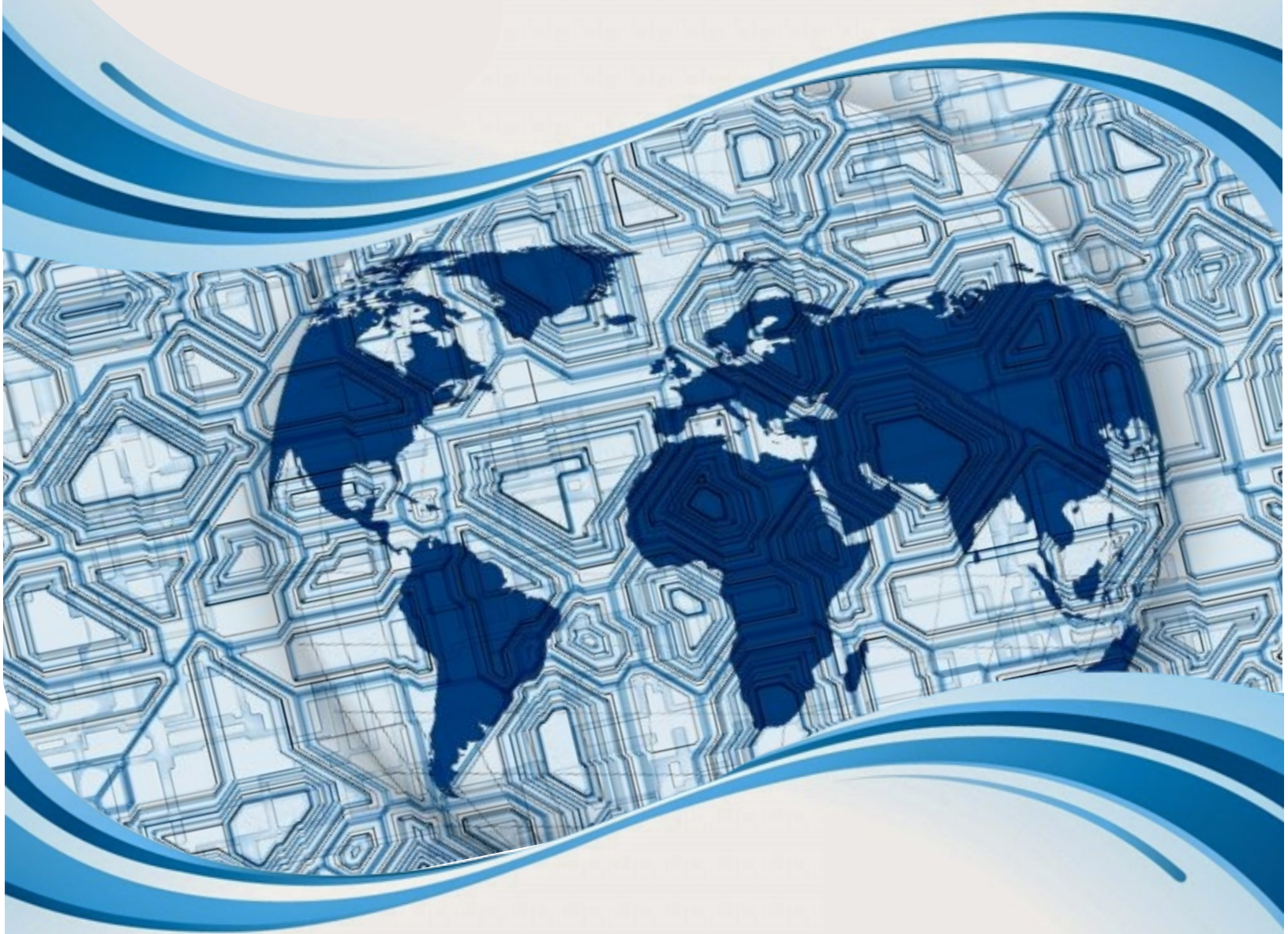




FINAL REPORT

“PEMBENTUKAN FORUM KERJASAMA EKONOMI INDONESIA-AFRIKA”



KERJASAMA BPPK KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2016

FINAL REPORT
“PEMBENTUKAN FORUM KERJA SAMA EKONOMI
INDONESIA-AFRIKA”

KERJA SAMA BPPK KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DAN

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2016

DAFTAR ISI
FINAL REPORT KAJIAN KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA-AFRIKA

DAFTAR ISI		i
EXECUTIVE SUMMARY		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Arti Penting Pembentukan Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Afrika	1
	B. Landasan-Landasan Kebijakan Pembentukan Forum Kerja Sama Ekonomi	2
BAB II	KERANGKA PEMIKIRAN	6
	A. Diplomasi Ekonomi	6
	B. Teori Rezim	10
	C. Pendekatan Kerja Sama Selatan-Selatan	13
BAB III	POTENSI KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA-AFRIKA	15
	A. Perdagangan	15
	B. Investasi	19
	C. Pariwisata	23
	D. Jasa	23
BAB IV	<i>LESSONS-LEARNED</i> FORUM KERJA SAMA EKONOMI DI KAWASAN AFRIKA	25
	A. Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	25
	B. Jepang	30
	C. India	35
	D. Korea Selatan	37
	E. Malaysia	41
	F. Vietnam	46
	G. Analisis Perbandingan	48
BAB V	PEMBENTUKAN FORUM KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA-AFRIKA BAGI KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA: SEBUAH ANALISIS SWOT	51
BAB VI	REKOMENDASI KEBIJAKAN	59
	A. Kesimpulan Signifikansi Pembentukan Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Afrika	59

B. Langkah-langkah Pembentukan Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Afrika	60
1. Bentuk Kelembagaan	61
2. Rencana Kegiatan-Kegiatan	62
C. Modalitas Pembentukan Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia	64
DAFTAR PUSATAKA	66
DAFTAR PENELITI	71

EXECUTIVE SUMMARY

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dinamika dan prospek ekonomi Afrika serta merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Republik Indonesia terkait langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendukung pembentukan Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Afrika (FKEIA). Secara spesifik, penelitian ini ingin memfokuskan pada arti penting, strategi dan langkah-langkah membentuk FKEIA dalam mendukung keberhasilan misi diplomasi ekonomi Indonesia di Afrika.

Indonesia memiliki beberapa potensi keunggulan yang bisa menjadi modal penting untuk mendirikan FKEIA. Ada empat komponen penting yang menjadi modal Indonesia untuk memperluas kerja sama dengan negara-negara Afrika di bawah payung forum kerja sama Indonesia-Afrika. Empat komponen tersebut adalah (1) perdagangan, (2) investasi, (3) pariwisata, dan (4) jasa. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan analisis forum kerja sama negara-negara lain dengan negara-negara Afrika misalnya India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Vietnam. Dengan analisis tersebut, maka diperoleh sebuah pelajaran (*lesson learned*) yang bisa menjadi parameter kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan Indonesia dalam merealisasikan FKEIA (*SWOT analysis*).

Dengan segala beberapa keunggulan dan potensi yang dimiliki Indonesia, FKEIA sangat direkomendasikan untuk segera direalisasikan. Antara signifikansinya adalah terkait (1) dengan latar belakang sejarah Indonesia-Afrika; (2) terbukanya peluang investasi di Afrika terutama sektor industri pupuk, budidaya pertanian, peternakan, kehutanan sampai dengan pengelolaan hasil-hasil pertanian, peternakan, dan kehutanan; dan (3) fakta bahwa Indonesia telah membangun sejumlah inisiatif untuk memperkuat kerangka kerja sama bilateral dan *New Asian African Strategic Partnership (NAASP)* yang harus dimaksimalkan dengan baik.

Adapun langkah-langkah prinsip yang perlu dipertimbangkan adalah: (1) pembentukan FKEIA akan efektif dengan menggunakan pendekatan neo-liberalisme karena lebih memberikan ruang bagi Indonesia dan negara Afrika untuk dapat memaksimalkan peluang dan peran bersama-sama, memperkuat posisi tawar Indonesia, memberikan gagasan tentang sejumlah faktor yang harus dikelola agar tercapai *integrative bargaining* dalam skema yang terukur dan menjanjikan; (2) memperluas

Indonesia-South Africa Business Forum (ISABF), dengan menjadikan *template* ISBAF untuk sejumlah negara di Afrika, pembuatan forum ini dipergunakan untuk membangun komunikasi antara *stakeholder* investasi Indonesia di Afrika dengan mitra investasi di Afrika; (3) membuat konsorsium investor Indonesia untuk Afrika, untuk memutus sejumlah keraguan dari calon investor untuk masuk ke Afrika dengan memberikan ruang untuk tukar menukar informasi strategis dan teknis pengelolaan investasi secara professional; dan (4) perlu dibuat forum transformasi pengetahuan, keahlian, pembangunan yang diperuntukan untuk generasi muda di Afrika, dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan, *training*, budaya, humaniter, sebagai modal sosial untuk membangun diplomasi kebudayaan Indonesia di Afrika.

Sementara dalam konteks kelembagaan, penelitian ini merekomendasikan bahwa bentuk kelembagaan FKEIA adalah (1) *Summit* FKEIA lima tahun sekali dan bisa dipertimbangkan untuk “*back-to-back*” dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT); (2) setiap pertemuan forum dihadiri oleh pemerintah Indonesia dan semua negara di wilayah Afrika yang menjadi mitra Indonesia. Adapun secara spesifik bentuk kegiatannya adalah (1) *Summit*, (2) *Ministerial Conference*, (3) *Senior Officials Meeting*, (4) Forum Bisnis, dan (5) Forum Pendukung yang melibatkan misalnya: sektor perbankan, sektor Lembaga Swadaya Masyarakat atau *NGO (Non-Governmental Organization)*, dan media.

Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan beberapa pokok yaitu: (1) FKEIA melibatkan peran banyak pihak atau *multi-stakeholders*; (2) mengklasifikasikan peran yang dijalankan dalam dua kelompok yaitu kelompok pengguna jasa dan penyedia jasa, (3) perlunya dibentuk unit pengelola di bawah Kementerian Luar Negeri untuk masalah bantuan luar negeri, (4) mengintegrasikan kerja sama Selatan-Selatan dalam skema bantuan tersebut (*Aid for trade*), (5) promosi yang intensif melalui berbagai media, (6) perlunya perluasan jaringan di organisasi internasional misalnya WTO, Bank Dunia dan lain-lain, dan (7) pentingnya penguatan kerja sama bidang kemaritiman Indonesia-Afrika selaras dengan kebijakan Poros Maritim Dunia Presiden Joko Widodo.

BAB I: PENDAHULUAN

A. Arti Penting Pembentukan Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Afrika

Kebangkitan Afrika menjadi salah satu pendorong ekonomi dunia. Pada dasawarsa pertama abad ke-21, 6 dari 10 negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia berasal dari Afrika. Perkembangan Afrika ini mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara di Afrika menjadi target pasar non-tradisional bagi Indonesia dalam mengembangkan perdagangan dan investasi. Sebagai salah satu bentuk nyata upaya ini adalah pembukaan hubungan diplomatik dengan negara-negara Afrika. Saat ini Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan 50 dari 54 negara Afrika.

Meski demikian, sampai saat ini Indonesia sedikit di belakang banyak negara di kawasan Asia yang telah membentuk forum kerja sama khusus dengan negara-negara di Afrika sebagai wahana penguatan kemitraan. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sudah memiliki *Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC)* sejak tahun 2000. India menginagurasi *India-Africa Forum Summit* di tahun 2008. Perdagangan India-Afrika lebih besar tujuh kali lipat dari perdagangan Indonesia-Afrika, sementara perdagangan RRT-Afrika lebih besar 20 kali lipat (KEMLU, 2016). Negara tetangga kita Malaysia bahkan juga sudah memiliki *Malaysia-Africa Business Forum* yang merupakan bagian dari *Langkawi International Dialogue*.

Belajar dari pengalaman negara-negara lain di kawasan, Indonesia perlu juga mempertimbangkan pembentukan Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Afrika (FKEIA). Forum tersebut diharapkan mampu memberikan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih komprehensif terhadap Afrika, memperkuat kerangka kerja sama bilateral dan *New Asian African Strategic Partnership (NAASP)* yang telah ada serta sebagai alat penguat koordinasi bagi seluruh pemangku kepentingan baik dari kalangan pemerintah maupun dunia usaha dalam mendorong kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Afrika.

Kajian ini ditujukan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan luar negeri Indonesia terkait dengan wacana pembentukan FKEIA. Selanjutnya, penelitian diarahkan untuk menelaah beberapa isu di antaranya manfaat dari pembentukan FKEIA, langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pembentukan forum tersebut dan format serta mekanisme kerja dari forum dimaksud untuk memaksimalkan manfaatnya bagi Indonesia.

Berdasarkan pada fakta-fakta di atas, penelitian ini akhirnya bertujuan untuk melihat dinamika dan prospek ekonomi Afrika serta merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Republik Indonesia terkait langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendukung pembentukan FKEIA. Secara spesifik, penelitian ini ingin memfokuskan pada **arti penting, strategi dan langkah-langkah membentuk Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Afrika (FKEIA) dalam mendukung keberhasilan misi diplomasi ekonomi Indonesia di Afrika.**

B. Landasan-Landasan Kebijakan Pembentukan Forum Kerja Sama Ekonomi

1. Pembukaan UUD 1945

Pembentukan FKEIA merupakan upaya sistematis dari pemerintah Indonesia untuk pencapaian kepentingan nasional Indonesia bahwa dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam pembentukan Forum Kerja Sama Indonesia dan Afrika.

2. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang pada UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pembentukan FKEIA adalah bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk melakukan hubungan luar negeri dalam kerangka pencapaian kepentingan nasional.

- a. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini telah melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional;
- b. Bahwa pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral atau multilateral diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas-aktif.

Tentang teknis pembentukan FKEIA merujuk kepada pasal 11 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat didirikan lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, badan promosi, dan lembaga atau badan Indonesia lainnya di luar negeri.
- b. Pendirian lembaga dan atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri.

Dan pasal Pasal 12 yang menyatakan:

- a. Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat juga didirikan lembaga persahabatan, lembaga kebudayaan, dan lembaga atau badan kerja sama asing lain di Indonesia.
- b. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendirian lembaga atau badan kerja sama asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Pembentukan FKEIA agar berjalan dengan efektif dan efisien merupakan bagian dari perjanjian internasional sebagaimana tercantum dalam bagian menimbang pada UU No.24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula.

Yang tercermin pada pasal 4 ayat 1 dan 2 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik;
- b. Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Maupun dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa:

- a. Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri;
- b. Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia;
- c. Pedoman delegasi Republik Indonesia yang perlu mendapat persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut:
 - i. Latar belakang permasalahan;
 - ii. Analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;
 - iii. Posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.
- d. Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing.

Dan juga merujuk pada Pasal 6:

- a. Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan;
- b. Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikat diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak.

4. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Selaras pembentukan FKEIA, UU No. 7 tahun 2014 mengamanatkan agar Indonesia semaksimal mungkin bisa memanfaatkan hak internasional Indonesia atas sumber daya perdagangan luar negeri. Antara hak tersebut adalah terkait: (1). hak akses pasar untuk tujuan ekspor, sumber impor dan investasi; dan (2). hak untuk melindungi bangsa dari eksese negatif perdagangan luar negeri atau hak penerapan *border security*. Kedua hak ini muncul dari hasil kesepakatan kerjasama perdagangan dengan negara lain.

Selain dua hal di atas, tujuan utama negosiasi dan perluasan kerja sama perdagangan tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat 19 yang menyatakan bahwa:

“Kerja sama Perdagangan Internasional adalah kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.”

Pada ayat sebelumnya Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa:

“Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau organisasi internasional.”

Dengan demikian, dalam konteks FKEIA pemerintah harus berperan memastikan agar proses kerja sama perdagangan bisa tercapai dan sesuai yang diamanatkan UU No. 7 tahun 2014. Tujuan akhirnya selain keuntungan tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia yang lebih luas termasuk meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Misalnya ketahanan energi, mengamankan investasi Indonesia di luar negeri serta menjaga ketahanan ekonomi, sosial-budaya, politik dan pertahanan-keamanan Indonesia dari berbagai ancaman.

BAB II: KERANGKA PEMIKIRAN

A. Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi bisa diartikan sebagai realisasi dari berbagai aktivitas yang ditujukan untuk memperoleh kepentingan ekonomi negara asal (Rana, 2011). Dalam sudut pandang pelaku bisnis, peran agen pemerintah menjadi penting dalam kaitannya dengan mempromosikan peluang bisnis dan mengarahkan para pelaku bisnis agar dapat meraih keuntungan maksimal. Diplomasi ekonomi mampu menjelaskan fenomena peran dan fungsi aktor diplomatik post-modern. Dikarenakan terminologi diplomasi ekonomi tergolong masih baru. Merujuk dari definisi G.R Berridge dan Alan James (2003) yaitu:

“Economic diplomacy is concerned with economic policy issue, e.g. work of delegations at standard setting organisations such as WTO and BIS. Economic diplomats also monitor and report on economic policies in foreign countries and advise the government on how to best influence them. Economic Diplomacy employs economic resources, either as rewards or sanctions, in pursuit of a particular foreign policy objective. This is sometimes called ‘economic statecraft’.”

Berdasarkan definisi di atas, diplomasi ekonomi adalah sebuah upaya untuk merumuskan metode terbaik dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, atau sumber daya produksi dalam lingkup internasional. Diplomasi ekonomi bisa dipahami dengan memperluas terminologi diplomasi yang tidak hanya berkaitan tentang hubungan antar negara di sistem internasional tetapi juga berhubungan langsung dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik antar aktor politik baik secara formal maupun informal (Lee, Donna & Hocking, 2010).

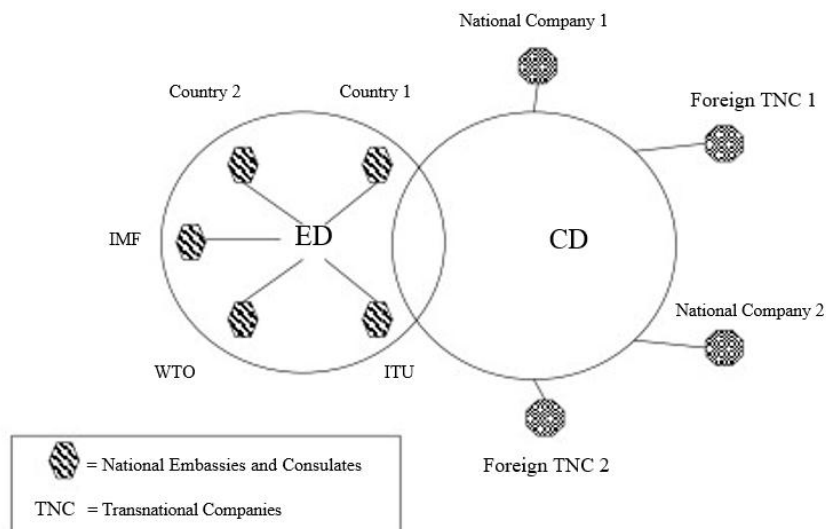
Terminologi diplomasi ekonomi dapat dipahami sebagai rangkaian metode dan proses dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi seperti ekspor, impor, investasi, hutang, bantuan, tenaga kerja dan imigrasi. Ini tidak hanya meliputi aktor negara saja melainkan aktor non-negara yang melakukan sesuatu untuk mencapai kepentingannya di luar batas negaranya juga termasuk (Baine, & Woolcock, 2003).

Diplomasi ekonomi menurut Baine & Woolcock (2003) memiliki 3 macam elemen utama. Pertama, penggunaan pengaruh politik dan hubungan bilateral dalam mempengaruhi kebijakan perdagangan kedua belah pihak seperti menyempurnakan suatu pasar yang telah ada atau kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko bisnis diluar batas

negara. Kedua, aktivitas ekonomi antar negara memberikan keuntungan bersama dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini memberikan motivasi kepada kedua belah pihak untuk secara spesifik menstabilkan hubungan diplomatik antar kedua negara dan meningkatkan kerja sama dalam situasi kondusif. Dengan kata lain, investasi yang sudah dikeluarkan baik dalam bentuk teknologi maupun infrastruktur akan menjadi sia-sia apabila terjadi perang. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi secara tidak langsung akan menghasilkan pola dan struktur keamanan kawasan yang dilandasi oleh motif ekonomi bersama. Ketiga, melakukan konsolidasi untuk menciptakan iklim politik dan lingkungan politik internasional yang mendukung tujuan dari kebijakan luar negeri suatu negara. Konsolidasi dilakukan dengan melibatkan organisasi internasional seperti *International Monetary Fund (IMF)*, *World Trade Organization (WTO)* atau dalam organisasi multilateral untuk mendukung kepentingan nasional yang tertuang dalam kebijakan luar negeri suatu negara.

Di sisi lain, diplomasi komersial adalah hasil dari misi diplomatik untuk mendukung korporasi negara asal secara finansial dengan tujuan meraih kesuksesan ekonomi di negara tujuan. Diplomasi komersial bisa diartikan sebagai misi pendampingan diplomatik pelaku bisnis sehingga mampu dimanfaatkan oleh perusahaan nasional yang ingin melakukan investasi atau ekspansi di level internasional (Scholte, 2000). Diplomasi komersial menjadi penting karena bersifat pendukung, yaitu memberikan informasi penting mengenai potensi dan kondisi ekonomi bisnis negara tujuan.

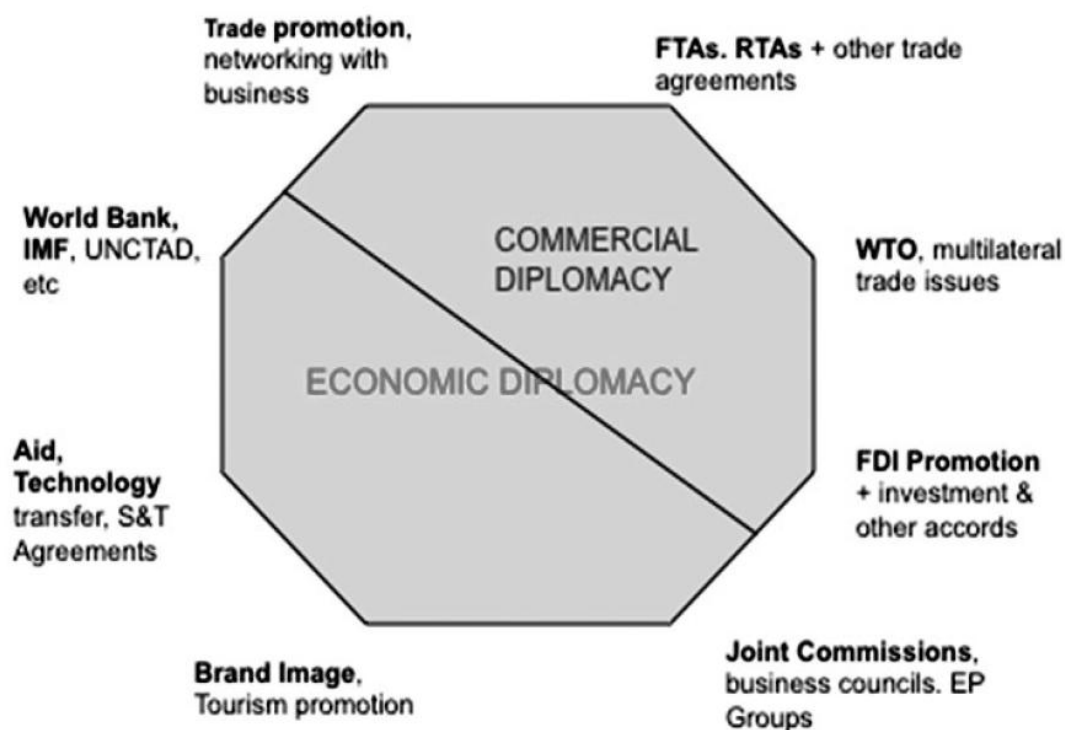
Grafik 1: Diplomat Ekonomi (ED) vs Diplomat Komersial (CD)



Sumber: Saner & Yiu (2001)

Perdagangan internasional dan investasi asing adalah dua komponen penting dalam usaha mengembangkan perekonomian nasional. Pemerintah mencoba untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang potensial untuk menjadi rekan kerja. Pemerintah atau negara dalam hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan dukungan kepada korporasi dan perusahaan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi di level internasional ketika diperlukan. Bentuk dukungan seperti ini akan memberikan kemudahan perusahaan nasional untuk berkembang sekaligus dapat diarahkan oleh pemerintah agar sesuai dengan arah diplomasi luar negeri negara itu sendiri. Atase Perdagangan menawarkan pendampingan dalam misi diplomatik yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan investasi. Dikarenakan Atase Perdagangan merupakan aktor diplomatik pemerintah yang sah. Mereka memiliki akses dan diberikan mandat untuk melakukan diplomasi komersial dengan membantu ekspansi dan pengaruh bisnis nasional di tingkat global.

Grafik 2: Diplomasi Ekonomi dan Komersial



Sumber : Rana (2007).

Diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh negara menurut Rana (2007) memiliki empat fase dalam implementasinya. Pertama, diplomasi ekonomi secara khusus menekankan pada aspek perdagangan. Dengan demikian, kegiatan promosi merupakan komponen penting dalam fase awal melakukan diplomasi ekonomi. Promosi dalam hal ini dapat dikaitkan dengan aktivitas investasi ke dalam dan keluar suatu negara. Kemudian dilanjutkan dengan fase pembentukan jaringan. Dengan melakukan pendekatan diplomatik, aktor pendukung seperti perusahaan bisnis, kamar dagang, dan industri akan lebih mudah berkontribusi dengan berbagai aktivitas ekonomi masing-masing. Berikutnya dilanjutkan dengan fase promosi negara. Diplomasi ekonomi dapat secara umum dipahami sebagai kegiatan promosi yang ditujukan untuk memperkenalkan profil ekonomi dari sebuah negara. Dalam hal ini, diplomasi ekonomi dimaksudkan untuk menghubungkan semua hal yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi seperti tenaga kerja, pertukaran mata uang, dan pariwisata. Fase terakhir dalam diplomasi ekonomi adalah ketika memasuki tahap regulasi. Pembentukan organisasi seperti WTO memberi dampak signifikan terhadap kompleksitas perdagangan internasional. Dengan demikian, diplomasi ekonomi menjadi penting dikarenakan adanya tantangan dari setiap negara untuk mempertahankan kepentingan masing-masing dalam negosiasi regulasi perdagangan internasional.

Berdasarkan pandangan Satow (1979), diplomasi modern secara definisi dapat diartikan sebagai aplikasi dari intelegensi dan aksi perilaku dari aktor formal antar pemerintah dari negara independen. Definisi tersebut menggambarkan secara jelas bahwa diplomasi itu merupakan ranah eksklusif dari aktor diplomatik pemerintah. Dengan adanya globalisasi dan berkembangnya demokratisasi, implementasi diplomasi juga mengalami perkembangan. Dalam hal ini muncul aktor selain negara yang secara tidak langsung mempengaruhi dan terlibat dalam proses implementasi kebijakan luar negeri misalnya organisasi non-pemerintah atau *non-governmental organization (NGO)*. Diplomasi secara keseluruhan mulai melibatkan partisipasi dari banyak aktor dan dari berbagai domain. Dengan kata lain, ada perubahan tentang bagaimana melihat diplomasi sebagai sebuah profesi.

Tabel 1: Peran dan Fungsi Diplomasi Post-Modern

	Functions	Roles
State Actors	Economic diplomacy Commercial diplomacy	Economic diplomats Commercial diplomats
Non-State Actors	Corporate diplomacy Business diplomacy National NGOs Transnational NGOs	Corporate diplomats Business diplomats National NGO diplomats Transnational NGO diplomats

Sumber: Saner & Yiu (2001).

Dalam konteks ini, sistem ekonomi internasional yang bersifat multilateral sebagaimana diregulasi oleh WTO atau IMF telah membuka partisipasi banyak aktor. Peran Kementerian Luar Negeri sebagai aktor utama dalam proses pengambilan kebijakan akan semakin diperkuat dengan adanya aktor selain negara tersebut. Dengan demikian, sinergi antar pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam proses implementasi kebijakan luar negeri semakin diperlukan. Hal ini bisa dimaksimalkan melalui peran sejumlah staf di kantor perwakilan di WTO termasuk di kantor-kantor perwakilan di negara sahabat. Artinya peran dari setiap aktor baik itu dari kementerian termasuk yang melibatkan swasta sangat diperlukan dalam sebuah diplomasi perdagangan.

B. Teori Rezim

Dalam studi yang dilakukan oleh Hasenclever et. al. (2010) setidaknya terdapat tiga pendekatan besar yang dapat dipergunakan untuk memahami perilaku dari kelembagaan internasional, yakni pendekatan *realism*, *neo-liberalism*, dan *cognitivism*.

Dalam pendekatan *realism*, variabel utama yang paling menentukan perilaku dari organisasi internasional adalah pencapaian kekuasaan (*power*) dalam bentuk kemampuan mendominasi perilaku anggota yang lain. Tujuan utama dari aktor untuk terlibat dalam suatu rezim adalah bagaimana negara tersebut dapat meningkatkan kekuatan hegemoninya dalam sistem internasional secara luas.

Implikasi terhadap pembangunan kelembagaan dalam rezim menjadi lemah, di mana pelembagaan yang dilakukan justru untuk memperkuat dominasi aktor dalam lembaga, dan bukan memperkuat kekuatan dominasi lembaga kepada negara. Aktor negara yang paling

kuatlah yang paling punya *power* untuk menentukan ke arah mana suatu rezim internasional akan berpikir, bertindak dan berperilaku. Sehingga dalam model perilaku, pendekatan *realism* lebih fokus kepada pencapaian keuntungan secara relatif, dan lebih mengutamakan kepada aspek dominatifnya.

Sedangkan pendekatan *neo-liberalism*, mengasumsikan bahwa variabel utama pembentukan suatu rezim internasional adalah pencapaian kepentingan nasional dari semua anggota yang terlibat melalui sejumlah mekanisme bersama yang disepakati. Pelembagaan dalam pandangan neo-liberal dalam posisi menengah (*medium*) di mana negara-negara anggota dapat merumuskan usulan, dan bersedia untuk mengikuti sejumlah norma yang dihasilkan dalam rezim tersebut. Manakala rezim tersebut tidak memberikan fungsi yang maksimal terhadap suatu negara, negara memiliki otoritas yang kuat untuk menarik dari dari perikatan dengan rezime internasional tersebut.

Pandangan *Cognitivism*, mengasumsikan bahwa dasar utama pembentukan suatu rezim adalah pengetahuan tentang sesuatu hal yang sangat spesifik. Pengetahuan tersebut akan memandu ke arah mana pelembagaan rezim internasional tersebut akan bergerak. Pelembagaan rezim internasional harus mendasarkan diri terhadap sejumlah temuan objektif yang disepakati bersama, yang diyakini memiliki derajat kebenaran yang sangat tinggi, yang memungkinkan tersusunnya peta simulatif yang benar-benar nyata. Pelembagaan rezim dalam pandangan *cognitivism* menjadi sangat kuat, karena rezim internasional dimungkinkan untuk memperkuat otoritasnya terhadap anggotanya, sehingga anggota akan mengikuti norma dan regulasi yang dibuat oleh rezim tersebut.

Penjelasan lebih ringkas tentang tata kelola rezim internasional menurut Andreas Hasenclever sebagai berikut:

Tabel 2: Ragam Pemikiran Dalam Studi Rezim Internasional

	<i>Realism</i>	<i>Neoliberalism</i>	<i>Cognitivism</i>
<i>Central variable</i>	<i>power</i>	<i>interests</i>	<i>knowledge</i>
<i>Institutionalism</i>	<i>weak</i>	<i>medium</i>	<i>strong</i>
<i>Meta-theoretical orientation</i>	<i>rationalistic</i>	<i>rationalistic</i>	<i>sociological</i>
<i>Behavioral model</i>	<i>concerned with relative gains</i>	<i>absolute gains maximize</i>	<i>role-player</i>

Sumber: Hasenclever, et.al. (2010:6).

Merujuk dari teorisasi di atas, pembentukan FKEIA akan sangat relevan menggunakan pendekatan neo-liberalism. Di mana fokus utama pembentukan kerja sama adalah bagaimana meningkatkan produktivitas kerja sama dengan negara-negara Afrika untuk pencapaian kepentingan nasional Indonesia.

Pembentukan FKEIA, dengan menggunakan pendekatan neo-liberalism memungkinkan Indonesia untuk menjalankan peran untuk memperkuat posisi tawar Indonesia, melalui sejumlah aktivitas untuk yang membuat negara-negara Afrika tertarik dengan forum tersebut, dengan tanpa menyebutkan secara definitif sejumlah rincian kepentingan Indonesia yang akan dicapai, yang justru akan mengganggu pencapaian kesepakatan. Sementara, *exogenous shock crisis* yakni "*to increase the probability of success in efforts to negotiate the terms of international regimes and can help the negotiating parties to refocus on their common interest and to overcome stalemates that commonly occur in institutional bargaining.*" Sehingga jika terjadi sejumlah *dead-lock* dalam sejumlah pembahasan, pendekatan neo-liberalisme dapat lebih dinamis untuk memfokuskan kembali kepada kepentingan bersama yang telah disepakati sebelumnya.

Pendekatan neo-liberalisme dalam pembentukan FKEIA juga memberikan gagasan tentang sejumlah faktor yang harus dikelola agar tercapai *integrative bargaining* yang berhasil melalui sejumlah skema yang terukur dan menjanjikan yakni:

1. Solusi yang layak bagi kepentingan berbagai pihak;
2. Solusi yang signifikan bagi pencapaian kepentingan berbagai pihak;
3. Mekanisme kepatuhan dari berbagai pihak secara efektif dan jelas; dan
4. Memungkinkan penggabungan kepemimpinan, sesuai dengan situasi dan kondisi.

Tabel 3: Faktor-faktor yang mempengaruhi *Institutional Bargaining*

<i>I. Factors encouraging integrative bargaining</i>
<i>(1) Contractual environment blurring the zone of agreement and veiling the future distribution of benefits</i>
<i>(2) Exogenous shock of crisis</i>
<i>II. Factors promoting the success of integrative bargaining</i>
<i>(1) Availability of equitable solution</i>
<i>(2) Availability of salient solution</i>
<i>(3) Availability of clear-cut and effective compliance mechanisms</i>
<i>(4) (Mixture of entrepreneurial, structural, and intellectual) leadership</i>

Sumber: Hasenclever, et.al. (2010:75).

C. Pendekatan Kerja Sama Selatan-Selatan

Kerja sama Selatan-Selatan (KSS) menjadi pilihan yang menarik. Hal ini disebabkan skema KSS sangat ideal untuk negara berkembang. Konsep kerja sama negara berkembang tentu berbeda dengan negara maju yang sudah tertata dengan baik. Bagi negara berkembang kerja sama yang terjalin harus memberikan dampak nyata terutama kepada pembangunan dalam negeri, membuka peluang pekerjaan, perlindungan produk lokal termasuk masalah tarif bea masuk (Marinov, 2014). KSS pada dasarnya adalah perluasan bentuk kerja sama antara negara di Selatan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, perdagangan, lingkungan dan teknik. KSS biasanya diimplementasikan dalam bentuk pemberian bantuan, pelatihan, manajemen dan transfer teknologi (SSC-UNDP, 2016).

Beberapa langkah sudah dilakukan misalnya (1) *“International Training Workshop on Agriculture Sector for African and Middle East Countries in Mkindo-Morogoro”*, 17-23 Mei 2015. Training tersebut merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Kerja sama Teknis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia, dengan KBRI Dar es Salaam, Kementerian Pertanian (Kemtan), dan *Non-Aligned Movement Center for South-South and Technical Cooperation (NAM CSSTC)* (KEMLU, 2015); (2) *Training on Agriculture Sector for African Countries 2016*, hasil kerja sama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertanian (Republika 02/4/2016); (3) Magang bagi Petani Asia dan Afrika 2015, hasil kerja sama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertanian khususnya BBPP Lembang (BBPP, 2015); (4) *Agricultural and Rural Farmer's Training Center (ARF-TC)* di Gambia 10-23 November 2011, hasil kerja sama Kementerian Pertanian dengan Kementerian Luar Negeri (Okezone 9/9/2011).

Langkah pemerintah Indonesia membentuk *South-South and Triangular Cooperation (SSTC)*, harus mendapatkan apresiasi yang tinggi. Justru hal ini harus menjadi titik tolak peningkatan investasi dan perdagangan Indonesia di benua Afrika khususnya. Indonesia harus semakin percaya diri selaras dengan semakin diakuinya sebagai *“a middle income country”* dan meningkatnya peran penting di arena politik global seperti menjadi anggota G-20 (SSC-Indonesia, 2015). Harapannya tentu saja Indonesia akan memperoleh lebih dari segala potensi ekonomi di Afrika. Selain itu, dampak politisnya tentu akan sangat terasa terutama dukungan diplomasi yang sangat penting di forum internasional (Nainggolan, 2015). Persepsi bahwa Indonesia kurang mampu secara finansial sebaiknya mulai dihilangkan. Karena pada dasarnya Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk membantu negara-negara berkembang termasuk di Afrika melalui skema *Overseas*

Development Aids (ODA) (Hermawan & Kasim, 2010). Rencana pemerintah membentuk lembaga yang akan bertugas mengatur mekanisme bantuan luar negeri juga harus diberikan apresiasi tinggi. Hal ini tentunya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperkuat diplomasi Indonesia agar semakin kokoh. *Indonesian Aid, RI Aid* atau nama yang sejenisnya bisa untuk dipertimbangkan digunakan dalam program bantuan Indonesia ke luar negeri.

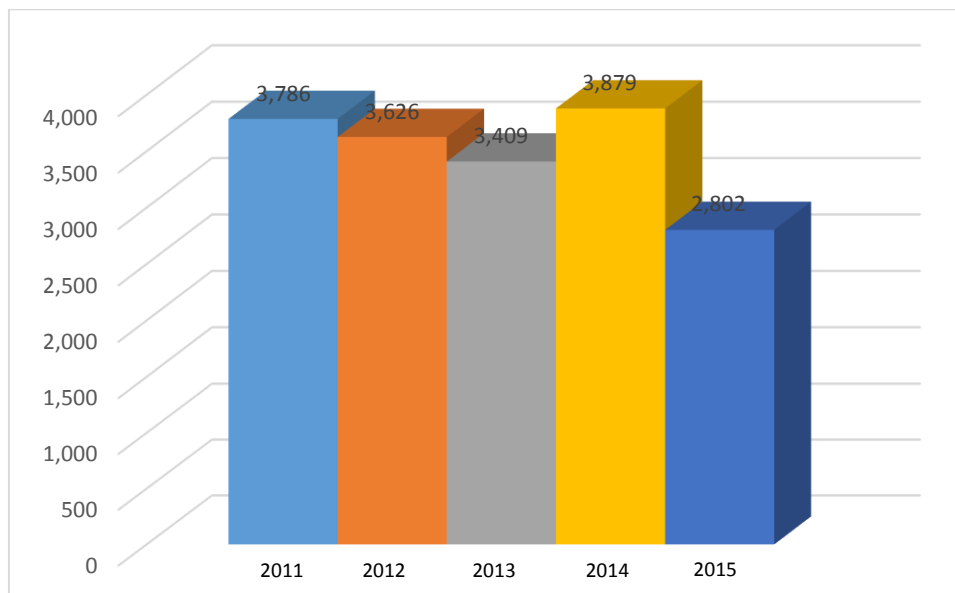
BAB III: POTENSI KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA-AFRIKA

Indonesia memiliki beberapa potensi keunggulan yang bisa menjadi modal penting untuk mendirikan FKEIA. Modal penting tersebut adalah beberapa aspek yang sangat besar potensinya untuk dikembangkan di Afrika. Ada empat komponen penting yang menjadi modal Indonesia untuk memperluas kerja sama dengan negara-negara Afrika di bawah payung forum kerja sama Indonesia-Afrika. Empat komponen tersebut adalah (1) perdagangan, (2) investasi, (3) pariwisata, dan (4) jasa. Diharapkan dengan potensi tersebut sektor ekonomi Indonesia lebih berkembang di Afrika di tengah melambatnya laju pertumbuhan ekonomi dunia. Oleh karena itu, pada bagian berikut dijelaskan perkembangan empat komponen yaitu perdagangan, investasi, pariwisata, dan jasa antara Indonesia-Afrika yang menjadi modal penting Indonesia untuk mendirikan FKEIA.

A. Perdagangan

Di bawah ini bisa dilihat beberapa pencapaian bidang perdagangan antara Indonesia-Afrika dalam beberapa tahun terakhir. Pada dasarnya pangsa ekspor Indonesia ke Afrika sangat potensial (Kementerian Perdagangan, 2016). Berikut adalah perkembangan ekspor Indonesia ke Afrika dan pencapaian lain.

Grafik 3: Perkembangan Ekspor Indonesia ke Afrika (Juta US\$)



Sumber: Kementerian Perdagangan (2016).

Data di atas menunjukkan ekspor Indonesia ke Afrika memang mengalami penurunan. Namun, dalam beberapa produk terutama consumer goods naik signifikan dari 1,01 milyar USD tahun 2011 menjadi lebih dari 1,4 milyar USD tahun 2015 (World Integrated Trade Solution Data, World Bank (2015)).

Tabel 4: Tujuan Ekspor Indonesia di Afrika

No.	Negara	Nilai: Juta US\$					Perubahan (%) 2015/2014	Trend (%) 2011-2015
		2011	2012	2013	2014	2015		
1.	Mesir	1,398	1,014	1,102	1,341	1,198	-10.67	-0.28
2.	Afrika Selatan	1,437	1,692	1,270	1,380	666	-51.71	-15.98
3.	Nigeria	466	413	558	649	446	-31.28	3.69
4.	Djibouti	186	270	286	307	278	-9.31	9.76
5.	Tanzania	299	237	193	202	214	5.66	-7.89

Sumber: Kementerian Perdagangan (2016).

Tabel 5: Ekspor Indonesia ke Afrika (Juta US\$).

No.	Produk	2011	2012	2013	2014	2015	Trend (%)
1.	Minyak kelapa sawit dan produk sejenis	1,988.0	1,802.3	2,008.3	2,801.8	2,233.1	6.97
2.	Sabun	236.8	266.7	262.1	234.5	159.2	-8.81
3.	Kertas dan produk sejenis	164.0	177.2	181.6	170.4	155.1	-1.50
4.	Mentega	151.9	138.2	137.1	171.9	122.9	-2.03
5.	Kopi	67.2	91.8	116.9	76.4	100.7	6.46
6.	Bahan baku fiber tiruan	14.5	14.0	49.3	61.5	83.2	64.45
7.	Industri asam lemak monokarbosilik	98.5	99.1	93.4	83.2	72.1	-7.68
8.	Alat pembersih kulit selain sabun	55.0	64.1	62.9	70.7	71.0	6.27
9.	Bahan baku fiber sintetis	83.6	84.5	83.5	90.1	70.0	-2.86
10.	Kendaraan bermotor dan mesin bermotor lainnya	90.3	101.5	77.6	76.1	61.3	-10.08

Sumber: Kementerian Perdagangan (2016).

Tabel 6: Impor Indonesia dari Afrika (Juta US\$).

No.	Produk	2011	2012	2013	2014	2015	Trend (%)
1.	Kapas	327.8	417.5	279.4	330.5	241.5	-8.10
2.	Biji coklat	41	48.8	34.2	253.5	119.7	46.09
3.	<i>Chemical wood pulp, dissolving grades</i>	307.2	236.5	240.4	159.3	109.9	-21.74
4.	<i>Natural calcium phosphates</i>	46.3	89.8	71.5	92.3	66.3	7.74
5.	Mineral atau pupuk kimia, <i>phosphatic</i>	80.6	40.3	112.8	58.6	48.6	-6.17
6.	<i>Diphosphorus pent-oxide</i>	75.6	86.2	114.8	103.8	41	-9.86
7.	Tembakau yang belum diolah	19.8	25.9	30.8	38.1	32	14.41
8.	<i>Dates, figs, nanas, alpokat, jambu biji, manga, manggis</i>	10.6	19.8	16.4	21.4	17.8	11.79
9.	Mineral atau pupuk kimia	1.3	1.7	5.2	0	17.3	-
10.	Sirup dari ekstraksi gula	9.8	9.2	8.2	14.2	13.7	11.67

Sumber: Kementerian Perdagangan (2016).

Tabel 7: Asal Impor Indonesia dari Afrika

No.	Negara	Nilai: Juta US\$					Perubahan (%) 2015/2014	Trend (%) 2011-2015
		2011	2012	2013	2014	2015		
1.	Nigeria	1,627	2,771	3,122	3,206	1,288	-61.04	-2.86
2.	Angola	120	503	213	209	640	205.96	28.09
3.	Aljazair	329	308	379	300	283	-5.66	-3.28
4.	Mesir	191	223	127	146	243	66.57	0.59
5.	Afrika Selatan	706	662	625	498	232	-53.47	-22.19
6.	DR of Congo	0	0	0	0	196		0

Sumber: Kementerian Perdagangan (2016).

Dari data di atas tampak bahwa potensi kerja sama perdagangan Indonesia di Afrika sangat besar. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan misalnya :

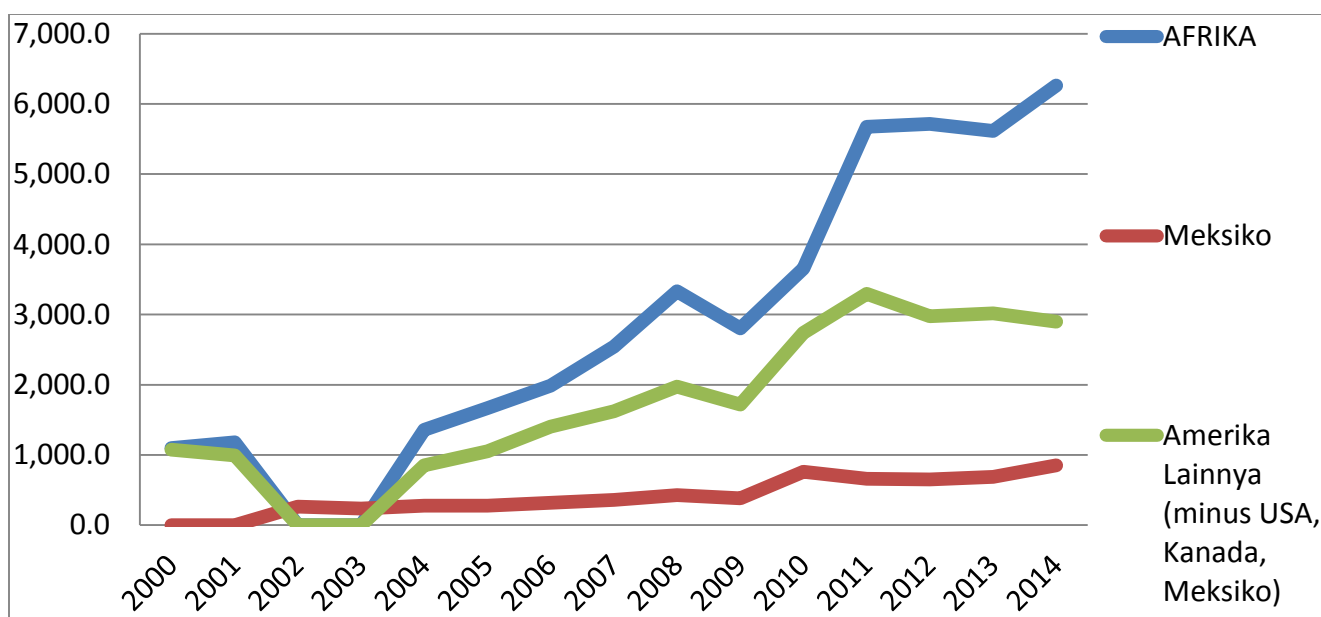
1. Tarif dan bea masuk di negara-negara Afrika masih tinggi dengan nilai rata-rata yang bermacam-macam, misalnya:
 - a. Mesir: 60% (Pertanian), 9.5% (Non-Pertanian);
 - b. Nigeria: 15.6% (Pertanian), 11.4% (Non- Pertanian);
 - c. Tanzania: 20.3% (Pertanian), 11.55% (Non- Pertanian);
 - d. Tunisia: 24.6% (Pertanian), 12.3% (Non- Pertanian).
2. Namun di sisi lain menjanjikan *hub/gateway* ke pasar yang lebih besar. Hal ini disebabkan sub-regionalisme Afrika yang sudah berkembang pesat misalnya Afrika Selatan berpotensi menjadi *hub* ke pasar SADC/SACU; Tunisia/ Mesir sebagai *hub* ke pasar Timur Tengah dan Eropa karena sudah FTA dengan EU, Turki, dan EFTA. Selain itu, peringkat daya saing Indonesia dengan negara-negara Afrika secara umum tidak jauh berbeda, bahkan lebih baik. Misalnya saja

Indonesia (37) dibandingkan dengan negara Afrika seperti Afrika Selatan (49); Tunisia (92); Mesir (116); Nigeria (124) (Kementerian Perdagangan, 2016).

3. Dari aspek komoditas, komoditas ekspor Indonesia cenderung berbeda dengan komoditas impor dari Afrika. Sedangkan impor Indonesia dari Afrika umumnya adalah bahan baku, seperti: kapas sebagai bahan baku tekstil, fosfat bahan baku pupuk, kurma, cokelat, limbah besi, dsb.

Secara keseluruhan potensi Afrika masih sangat besar dan terbuka. Hal ini bisa dilihat dalam grafik berikut.

Grafik 4: Pasar Potensial Afrika, Amerika Tengah, dan Amerika Latin
(Nilai ekspor 2000-2014 dalam juta US\$)



Sumber: INDEF (2016).

Di saat ekspor Indonesia ke pasar tradisional menurun sejak 2012-2014, namun ekspor ke kawasan Afrika secara umum mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa kawasan Afrika merupakan pasar yang prospektif. Dalam perkembangannya neraca perdagangan Indonesia – Afrika (2014): USD 11,7 milyar atau meningkat sebesar 11,7 % dibandingkan tahun 2013 sebesar USD 9,88 milyar. Adapun mitra dagang utama Indonesia di Afrika adalah Nigeria, Afrika Selatan, Mesir, Angola, Pantai Gading, Aljazair, Djibouti, Benin, Ghana, Tanzania, Kenya, Ethiopia. Negara-negara tersebut sangat tertarik dengan beberapa komoditi andalan Indonesia misalnya migas, kopi, kakao, biji-bijian, dan lain-lain. Afrika Selatan menjadi salah satu pembeli produk Indonesia terbesar setelah Malaysia dan

UEA dengan transaksi sebesar USD 52 juta dan disusul Mesir sebesar USD 43 juta (Kementerian Luar Negeri, 2016).

Beberapa komoditi Indonesia yang juga sangat berpotensi memperoleh pasar di Afrika dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 8: Komoditi Indonesia di pasar Afrika

No.	Komoditi	Negara Tujuan di Afrika
1.	Kulit dan produk turunannya	Egypt, Morocco, Algeria, South Africa
2.	Alat-alat kesehatan	Kenya
3.	Produk herbal	-
4.	Makanan olahan	-
5.	<i>Essential oil</i>	-
6.	Ikan dan Produk ikan	-
7.	Kerajinan tangan	Afrika Selatan
8.	Perhiasan	Afrika Selatan
9.	Rempah-rempah	-
10.	Alat tulis non-kertas	UEA dan Mesir

Sumber: Kementerian Perdagangan (2016).

B. Investasi

Dalam bidang investasi, ada peluang bagi investor Indonesia untuk menanamkan modalnya di Afrika. Pada saat yang sama, penanaman modal asing (FDI) dari Afrika ternyata juga semakin menjanjikan. Tercatat sampai saat ini FDI dari Afrika Sub Sahara Afrika ke Indonesia (2012-2014) sebesar USD 2,65 milyar (Kementerian Luar Negeri, 2016.). Hal ini tentu akan semakin meningkat jika dikelola dengan baik terutama dengan adanya FKEIA. Adanya investasi dari Afrika juga semakin menunjukkan bahwa negara-negara Afrika semakin baik perkembangan ekonominya.

Pada saat yang sama, penanaman modal dari Indonesia (*Outward Direct Investment*, ODI) dari waktu ke waktu semakin menunjukkan perkembangan signifikan. Hal ini tidak lain didorong oleh iklim investasi di Afrika yang semakin kondusif. Selain itu, melimpahnya sumber daya alam dan prospek pasar yang menjanjikan juga menjadi alasan penting para pengusaha Indonesia semakin melihat Afrika sebagai kawasan ekonomi potensial. Berikut ini bisa dilihat perkembangan investasi Indonesia di Afrika sejak tahun 2011 hingga 2015.

Tabe 9: Investasi Indonesia di Afrika

Tahun	Negara	Jenis Investasi	Investor Indonesia	Nilai Investasi
2011	Angola	Minyak dan Gas	Pertamina	1.5 milyar USD
2011	Nigeria	Pertambangan, minyak dan karet	Bakrie Group	960 juta USD
2012	Nigeria	Pupuk	Indorama Group	2.1 milyar USD
2013	Nigeria	Energi, pupuk	Indorama	1.2 milyar
2013	Aljazair	Konstruksi	PT Wijaya Karya	50 juta USD
2013	Liberia	Kelapa Sawit	Sinar Mas Group	1.6 milyar USD
2013	Libya	Konstruksi	PT Wijaya Karya	11.6 juta USD
2013	Afrika Selatan	Konstruksi	PT Wijaya Karya	31 juta USD
2015	Maroko	Makanan	Indofood Sukses Makmur	5 juta USD
2015	Kenya	Makanan	Indofood Sukses Makmur	7.3 juta USD
2015	Mozambique	Energi (Gas alam)	-	180 juta USD
2015	Mesir	Minyak dan Gas		96 milyar USD
Total Investasi				103.64 milyar USD

Sumber: data diolah dari berbagai sumber.

Pada saat yang sama, perkembangan aktivitas bisnis pengusaha Indonesia di Afrika juga menunjukkan peningkatan. Walaupun sifatnya masih penjangkakan, beberapa pengusaha Indonesia cukup antusias untuk berinvestasi di Afrika. Berikut dapat dilihat beberapa kesepakatan yang sudah dicapai pengusaha Indonesia di Afrika.

Tabel 10: Daftar Kesepakatan Investasi Indonesia di Afrika

No.	Negara	Perusahaan	Deskripsi	Keterangan
1.	Kamerun			Menurut KBRI di Abuja, Nigeria, ada tiga perusahaan Indonesia yang beroperasi di Kamerun dalam bidang perkayuan dan perkebunan karet.
2.	Mesir	Indorama Synthetic Tbk.	Mendirikan perusahaan Indorama Shebin C tahun 2007.	Bergerak dalam bidang tekstil
		Kedaung (barang pecah belah dan perlengkapan dapur)	Mendirikan perusahaan Pyramid Glass pada tahun 2008.	
		Indofood Sukses Makmur (mi instan)	Mendirikan perusahaan Indomie tahun 2009.	

3.	Ethiopia	Sinar Antjol (produsen sabun mandi dan sabun cuci merek B-29). B-29 mampu menguasai hampir 35% lebih pasar Ethiopia	Mendirikan sebuah perusahaan hasil kerja sama dengan investor lokal First Indo-Ethio Plc.	Keberhasilan Sinar Antjol mampu menarik perhatian beberapa perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di negara tersebut seperti Tjiwi Kimia, Indofood Sukses Makmur dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
4.	Ghana	Sinar Antjol	Dengan skema yang sama di Ethiopia juga mendirikan Sinar Indoghana Ltd.	
		Kedaung	Mendirikan Indo Ghana Enamel Industrial Ltd. tahun 2004	
		Wilmar International (minyak goreng merek Sania)	Melakukan investasi di Ghana sejak 2007.	
5.	Liberia	Oriental Timber Company	Didirikan sejak tahun 2002, perusahaan ini berhasil menyumbang pembukaan lapangan pekerjaan sebesar 2,500 orang termasuk TKI dengan nilai investasi sebesar 40 juta USD.	
6.	Libya	Medco Energi International Tbk.	Mendirikan Medco International Ventures Limited pada tahun 2012 yang bergerak dalam bidang migas.	Berjalan dengan baik walaupun sedikit terganggu dengan instabilitas politik di Libya
7.	Mauritania	Bakrie Group	Melalui Resources Minerals Tbk., mendirikan Tamagot Bumi SA yang bergerak dalam bidang pertambangan.	
8.	Madagaskar	Sinar Antjol	Mendirikan perusahaan Peace Indo adagascar, pada tahun 2012.	
9.	Nigeria	Indofood Sukses Makmur	Mendirikan De-United Food Industry Ltd hasil kerja sama dengan Tolaram Group sebuah perusahaan asal India dengan nilai perdagangan sebesar 125 juta USD pada tahun 2008	

		Sayap Mas Utama (Wings Group – So Klin)	Mendirikan Eco Supreme Resources Nigeria Ltd, hasil kerja sama dengan pengusaha lokal dengan hasil keuntungan mencapai 25 juta USD pada tahun 2008.
		Kalbe Farma Tbk	Mendirikan Orange Kalbe Ltd., pada tahun 2009 yang bergerak dalam bidang farmasi. Keuntungan yang diperoleh mencapai 40 juta USD.
		Indorama Synthetic Tbk.	Mendirikan Indorama Petrochemicals Ltd. Bergerak dalam bidang tekstil.
		Jakarana Tama (produsen Chiki mi instan)	Mendirikan Charmanuel Industries Ltd, dengan nilai keuntungan sebesar 40 juta USD pada tahun 2008.
		Holdent International Ltd (peralatan mandi)	Mendirikan Holdent International Ltd
		Eva Mandiri Brothers	Mendirikan Mandiri Garment Industry Co Ltd, yang bergerak dalam bidang garmen
		De-Mastering Technology Service Ltd (produsen CD)	Hasil kerja sama antara pengusaha Indonesia, Nigeria, Singapura dan Malaysia
		Magnet Integred (produsen CD)	Hasil kerja sama antara pengusaha Indonesia, Nigeria, dan Malaysia
		Media-Pro & Global Service Ltd	Hasil kerja sama antara pengusaha Indonesia, Nigeria, dan Singapura
		Bakrie Group	Mendirikan Bakrie Delano Africa Ltd, bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan karet termasuk pertambangan dengan nilai investasi sebesar 1 Milyar USD
10.	Sudan	Pertamina	Eksplorasi minyak
		Medco Energy International Tbk.	Eksplorasi minyak

C. Pariwisata

Potensi pariwisata terutama kedatangan wisatawan asal Afrika ke Indonesia sangat besar. Hal ini salah satunya didukung dengan kebijakan pemberlakuan bebas visa untuk 38 negara Afrika (Kemlu, 2016.). Meskipun secara statistik perkembangan kunjungan wisatawan Afrika ke Indonesia belum signifikan, namun rasa optimisme semua pihak semakin meningkat. Salah satu agen perjalanan asal Afrika Selatan, *Perfect Destination* misalnya menyatakan bahwa turis Afrika sangat menyukai objek wisata Indonesia terutama hutan basah yang sangat eksotis (Pikiran Rakyat, 16/5/2016). Testimoni tersebut menunjukkan salah satu bukti bahwa potensi wisatawan Afrika sangat besar di masa depan. Optimisme tersebut juga didukung dengan usaha gigih Kementerian Pariwisata dalam melakukan promosi yang agresif di Afrika (Suara Karya, 3/4/2016). Sejalan dengan hal tersebut, ada potensi besar lain yang bisa dimanfaatkan Indonesia dari tingginya kunjungan wisatawan asing ke Afrika untuk juga berwisata ke Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan kunjungan wisatawan Afrika khususnya ke Indonesia mulai tahun 2010 sampai tahun 2014 bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 11: Data Kedatangan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia Menurut Kebangsaan, 2010–2014

no	Nama Negara	2010	2011	2012	2013	2014
1	Afrika Selatan	12.691	15.579	17.228	21.757	25.048
2	Negara Afrika lainnya	14.509	16.061	24.355	29.541	31.455

Sumber : Pusdatin Kemenparekraf & BPS (2015).

D. Jasa

Sektor jasa terutama tenaga kerja Indonesia (TKI) memiliki potensi yang sangat besar. Indonesia berpeluang besar menambah kuantitas TKI terutama sektor formal untuk berkarir di Afrika. Selain itu, hal ini sedikit banyak akan mengurangi jumlah pengiriman TKI sektor non-formal yang selama ini mendominasi penempatan TKI. Para calon TKI juga mempunyai pilihan baru dengan memilih Afrika sebagai tujuan bekerja yang tidak kalah dengan negara lain. Meskipun jumlah TKI formal di Afrika masih belum signifikan, namun sangat berpotensi untuk meningkat kedepan. Walaupun belum ada data statistik yang bisa menjelaskan perkembangan TKI di Afrika, data berikut bisa menggambarkan tentang jumlah remitansi yang sangat menggembirakan. Sampai saat ini, menurut data resmi, TKI Indonesia terdapat di dua negara Afrika yaitu Mauritius sejumlah 838 orang, Afrika Selatan 587 orang (BNP2TKI, 2015; Kemlu, 2016). Sedangkan KBRI Kairo memperkirakan jumlah TKI yang

bekerja di Mesir mencapai 188.059 orang termasuk TKI yang berstatus tidak resmi sekitar 1.298 orang (Okezone, 14/2/2015).

Adapun jumlah remitansi TKI di Afrika adalah Ethiopia (USD 115,2 ribu/peringkat 5 setelah Malaysia USD 50,6 juta), Libya (USD 236 ribu), Irak (USD 194,4 ribu), UEA (USD 171, 6 ribu). Jumlah tersebut sangat berpotensi meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kebutuhan negara-negara Afrika akan jasa TKI. Antara sektor-sektor yang berpeluang besar diisi oleh TKI misalnya konstruksi, pertambangan, kesehatan, jasa (perawat, tenaga administrasi rumah sakit, restoran, perhotelan), sopir, pengelasan, tenaga teknologi informasi (Kompas, 6/10/2009). Selain itu, potensi bertambahnya jumlah TKI di Afrika juga didukung oleh meningkatnya investasi Indonesia di Afrika. Hal ini bisa dilakukan melalui skema *Transfer Intra Corporate (TIC)*. Dengan mekanisme TIC, maka peluang TKI bekerja di perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Afrika semakin terbuka lebar. Dengan demikian pembentukan FKEIA secara tidak langsung semakin membuka lebar lowongan pekerjaan kepada para TKI yang ingin bekerja di Afrika.

BAB IV: LESSONS-LEARNED FORUM KERJA SAMA EKONOMI DI KAWASAN AFRIKA

A. Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) termasuk negara berkembang yang memiliki kapasitas dan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Sebagai kekuatan ekonomi yang berkembang pesat, RRT tidak hanya memperkuat interaksi perdagangan dengan negara-negara maju tetapi juga memberikan prioritas kerja sama dengan negara berkembang. Salah satu kawasan yang kemudian menjadi prioritas perdagangan dan investasi RRT adalah wilayah Afrika. Hubungan perdagangan RRT dan Afrika telah terjalin sejak tahun 1949 yang kemudian dilanjutkan dalam bentuk dukungan satu sama lain. Pada tahun 1956, RRT secara resmi membuka hubungan diplomatik dengan Mesir sebagai negara Afrika pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan RRT. Pada tahun 1978, RRT telah membuka hubungan diplomatik dengan 40 negara di Afrika.

RRT menginisiasi sebuah forum kerja sama khusus dengan Afrika. Forum khusus tersebut dibuka oleh RRT dan 44 negara di Afrika dalam bentuk konferensi pembentukan *Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC)*. FOCAC adalah forum yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat interaksi dan mengembangkan kerja sama RRT-Afrika. Forum ini juga diharapkan mampu mempromosikan dan meningkatkan efektifitas kerja sama politik dan ekonomi RRT-Afrika sehingga mampu memperoleh keuntungan bersama.

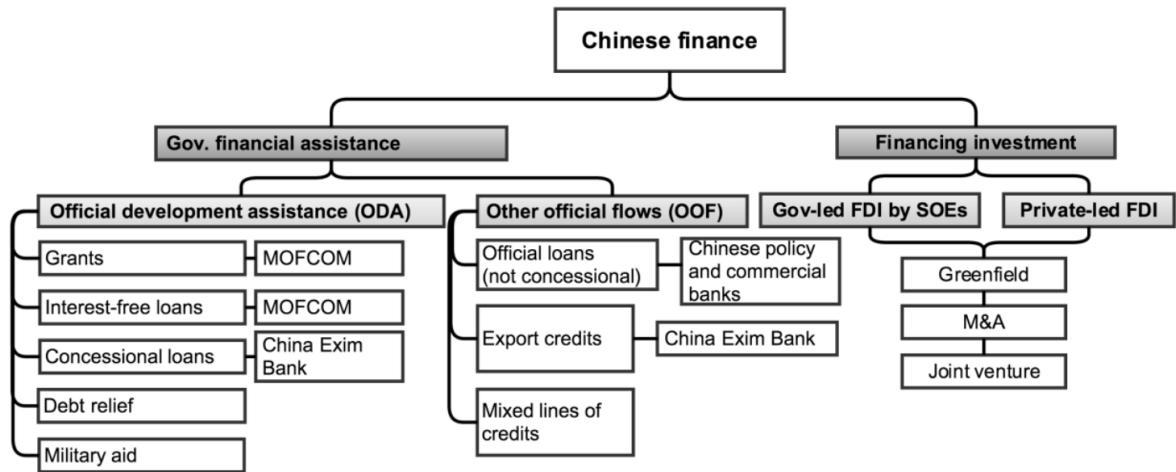
FOCAC adalah forum dengan pertemuan yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Dalam setiap pelaksanaannya disepakati bahwa tuan rumah penyelenggara forum akan bergantian antara RRT dan salah satu negara di Afrika. FOCAC memberikan dampak besar dalam hubungan RRT-Afrika. Sebagai contoh, dalam salah satu konferensi FOCAC di Beijing tahun 2006, Presiden RRT Hu Jintao secara resmi mengumumkan akan menggandakan bantuan RRT ke Afrika pada tahun 2009. Bantuan tersebut berupa pinjaman dan kredit sebesar lima milyar USD, membangun infrastruktur sosial seperti rumah sakit dan sekolah, serta memberikan pelatihan kepada sekitar 15 ribu profesional di Afrika (Yuliantoro, 2012).

Tren perdagangan RRT dan Afrika mengalami peningkatan yang signifikan antara akhir dekade 1990 dan setelah FOCAC dibentuk. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari data bahwa RRT menjadikan kawasan Afrika sebagai target ekspor dan mencapai hampir

25% total nilai perdagangan yang dilakukan negara-negara di Afrika, nilai ini mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 1985 yang hanya mencapai 2,3% (Pigato & Tang, 2015). Dalam kurun waktu 10 tahun pertama setelah pembentukan FOCAC, RRT mengalami peningkatan nilai perdagangan bilateral dari 10,6 milyar USD menjadi 91,07 milyar USD. Nilai tersebut berbanding lurus dengan peningkatan nilai investasi RRT di Afrika yang awalnya sebesar 220 juta USD menjadi 1,4 milyar USD. Peningkatan nilai investasi dan perdagangan RRT dan kawasan Afrika menjadikan total pendapatan RRT di Afrika dari yang semula 1,1 milyar USD menjadi 28,1 milyar USD di tahun 2009 (CATAR, 2010).

RRT sebagai negara penginisiasi FOCAC memiliki 3 karakteristik utama dalam upaya menyukseskan forum tersebut. Pertama, negara RRT mampu menyediakan anggaran dana yang besar yang ditujukan untuk keperluan investasi baik dalam bentuk pinjaman lunak, pembangunan infrastruktur, dan ekspansi bisnis. Kedua, negara RRT melibatkan sekitar 27 institusi dari berbagai kementrian, lembaga resmi pemerintah, dan Bank pemerintah RRT. Hal tersebut menjadikan FOCAC mampu mengefektifkan perannya hingga di tingkat teknis. Dengan kata lain, diperlukan koordinasi internal antar-institusi RRT yang efektif sehingga mampu menyukseskan FOCAC. Ketiga, pendekatan pemerintah RRT dengan negara-negara berkembang di Afrika menekankan kepada prinsip non-intervensi dan secara konsisten memberikan bantuan seperti yang telah dijanjikan oleh RRT.

Grafik 5: Aliran Investasi Luar Negeri RRT di Afrika

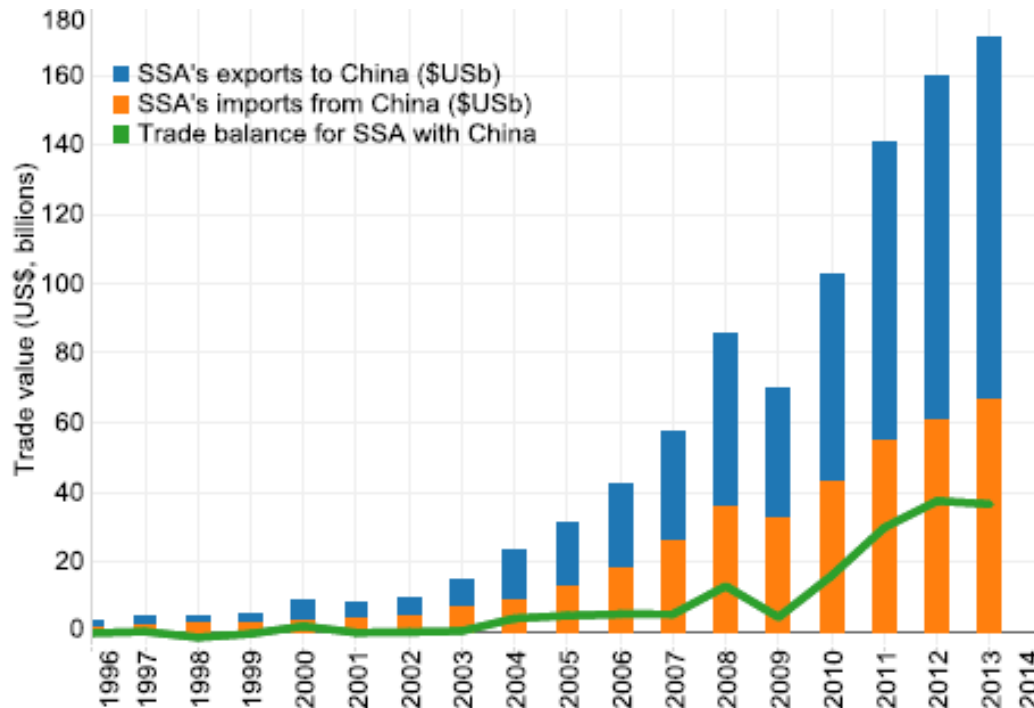


Sumber : Strange et al. (2013)

Distribusi dan aliran investasi RRT di Afrika secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Official Development Assistance (ODA)* dari pemerintah RRT dan *Other Official Flows (OOF)*. ODA sendiri berbentuk bantuan langsung seperti pinjaman lunak, pinjaman bersyarat, penghapusan utang, dan bantuan militer. Secara garis besar, bentuk aliran investasi RRT di kawasan Afrika merepresentasikan keinginan RRT untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan standar hidup di wilayah negara berkembang.

Bentuk aliran dana RRT di Afrika mengalami perubahan mendasar dalam perkembangannya di FOCAC. Sebelum tahun 2009, aliran dana berupa hibah dan pinjaman tanpa bunga mengisi sekitar 70% dari total dana RRT yang mengalir ke wilayah Afrika. Hal tersebut kemudian berubah di tahun 2010 ketika lebih dari 50% dari total bantuan dana asing RRT di Afrika berupa pinjaman bersyarat. Seperti ditekankan oleh Bank Exim RRT, pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi antara negara berkembang dan RRT adalah karena perjanjian kerja sama menekankan bahwa 50% dari nilai investasi dan pinjaman lunak RRT harus digunakan untuk membayar jasa dan barang dari negeri RRT (Brautigam, 2011).

Grafik 6: Nilai perdagangan RRT di Afrika periode 1996-2014



Sumber: World Integrated Trade Solution Data, World Bank (2015).

Pembentukan FOCAC pada tahun 2000 memberikan dampak positif terhadap nilai perdagangan RRT di Afrika. Dari sudut pandang RRT, melakukan perdagangan dengan kawasan Afrika jelas menguntungkan dikarenakan nilai pertumbuhan ekspor RRT lebih besar dari nilai impor RRT dari negara-negara Afrika. Hal tersebut menjadikan neraca perdagangan RRT di Afrika menjadi positif. Komoditas ekspor dan impor antara RRT dan Afrika merepresentasikan kecocokan komoditas dalam berdagang. Sebagai contoh, komoditas utama ekspor kawasan Afrika ke RRT adalah bahan produksi mentah seperti minyak bumi, uranium, aluminium, fosfat, tembaga, nikel dan logam mulia. Sedangkan komoditas impor kawasan Afrika dengan RRT merupakan produk jadi yang digunakan langsung oleh konsumen di Afrika. Produk tersebut meliputi barang-barang rumah tangga, alat elektronik, dan tekstil. Bahkan RRT termasuk mampu mengirimkan mesin-mesin pabrik dan alat transportasi. Komoditas ekspor RRT sebenarnya tidak jauh berbeda dengan komoditas ekspor Uni Eropa di Afrika. Tetapi pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Afrika tertarik untuk mengimpor barang dari RRT dikarenakan harganya yang lebih murah dibandingkan dengan Uni Eropa untuk barang serupa (Pigato & Tang, 2015).

Peta 1: Rencana Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur Rel Kereta Api di Afrika Timur dengan RRT



Sumber : BBC (12/5/2014)

Rencana pembangunan jalur kereta api merupakan salah satu komitmen pemerintah RRT dalam pembangunan infrastruktur di Afrika. Salah satu mega proyek tersebut ialah *East Africa Railway Masterplan* kerja sama antara RRT melalui perusahaan nasional *China Road and Bridge Corporation (CRBC)* dan *East African Community* yang terdiri dari Burundi, Kenya, Rwanda, South Sudan, Tanzania, dan Uganda. Sampai tahun 2015 RRT melalui *The Export-Import Bank of China* telah menginvestasikan sebesar 131 milyar USD untuk proyek tersebut. Jalur kereta api tersebut diharapkan akan menghubungkan Kota Mombasa di Pantai Timur Kenya dengan kota-kota utama di Afrika Timur misalnya Kampala, di Uganda, dan Juba, di Sudan Selatan (CNN, 16/5/2016). Selain itu, pemerintah RRT bekerja sama dengan Uni Afrika juga terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur kereta api melibatkan beberapa kota besar di negara-negara Afrika. Mega proyek pembangunan rel kereta api tersebut akan menghubungkan Pantai Gading, Burkina Faso, Niger dan Benin. Mega proyek lain juga melibatkan pemerintah RRT dengan Tanzania, Mali, Mesir, Ethiopia dan Djibouti (Bloomberg, 8/4/2016).

Strategi RRT dalam FOCAC secara garis besar menekankan pada kemampuan finansial yang besar untuk berinvestasi dan melakukan ekspansi pasar di Afrika. Kemudian

pendekatan RRT yang menganut prinsip non-intervensi lebih mudah diterima negara-negara Afrika sehingga RRT bisa dijadikan mitra pendanaan alternatif selain negara-negara barat. Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa RRT serius dalam memberikan bantuan berupa hibah, pinjaman lunak, maupun pinjaman bersyarat yang bersifat membangun Afrika. Dengan kata lain, RRT sebagai negara penginisiasi FOCAC tidak dilihat sebagai ancaman atau bentuk penjajahan baru oleh negara-negara Afrika.

RRT memandang bahwa membuka hubungan dengan Afrika merupakan sebuah realisasi dari kemitraan yang strategis. RRT memandang bahwa kemitraan dengan Afrika menjadi penting karena ketersediaan dukungan politik di kancah internasional, kebutuhan energi dalam negeri, dan keuntungan perdagangan (Eisenman, 2007). Dalam hal ini, dukungan politik negara-negara Afrika untuk RRT tidak lepas dari persoalan RRT-Taiwan yang membutuhkan suara dan akhirnya memenangkan RRT di PBB atas Taiwan.

B. Jepang

Berakhirnya Perang Dingin tahun 1990 menjadi babak baru hubungan Jepang-Afrika yang sebelumnya tidak mengalami perkembangan. Pemasaran katun Jepang ke Afrika Timur dan Afrika Barat cukup mengguncang hegemoni Inggris dan mendorong praktek neomerkantilisme masa itu (Ampiah, 1990). Pada awal 1960-an, ekspor Jepang ke Afrika bernilai sekitar 10% dari total perdagangan Jepang. Tetapi, situasi tersebut berubah seiring dengan perubahan struktur industri Jepang. Pada akhir tahun 1980-an angka tersebut menurun hingga nilainya kurang dari 1% (Morikawa, 2000:148). Meskipun demikian, Jepang merupakan mitra dagang Afrika Selatan yang penting, terutama ketika Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara tersebut. Pada tahun 1987 ekspor Jepang ke Afrika Selatan meningkat 37%, impornya pun meningkat 8%. Jika dihitung secara nasional, angka ini setara dengan 2% dari total perdagangan Jepang (Nester, 1991: 31)

Seiring dengan kemajuan perekonomiannya, keterlibatan Jepang di Afrika meningkat dalam bentuk pemberian *Official Development Assistance (ODA)*. Jepang bahkan menjadi pendonor terbesar dalam program bantuan asing. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jepang juga aktif dalam *Peace Keeping Operation (PKO)* yang diampu oleh PBB di Mozambik dan Rwanda.

Yang menarik dalam hal ini adalah Jepang pula yang merupakan pelopor inisiasi pelebagaan forum kerja sama yang melibatkan berbagai pihak dengan Afrika. Padahal, para pelaku ekonomi Jepang tidak menunjukkan minat yang besar untuk meningkatkan

volume perdagangan maupun investasi ke Afrika. Pada tahun 1993 Jepang mulai menggelar *Tokyo International Conference for Africa's Development* (TICAD) yang pertama tetap rutin dilaksanakan secara berkala hingga kini.

TICAD merupakan forum dialog kebijakan yang diadakan secara berkala untuk mendorong dialog kebijakan tingkat tinggi antara para pemimpin Afrika dan mitra-mitra pembangunannya. Pada mulanya konferensi ini dilaksanakan sebagai kegiatan lima tahun sekali. Namun, kesepakatan terbaru menyatakan bahwa mulai tahun 2016 forum ini akan dilaksanakan tiga tahun sekali.

Inisiatif ini bertepatan dengan berakhirnya Perang Dingin yang mengendurkan semangat pemberian bantuan oleh negara-negara maju kepada negara berkembang, khususnya Afrika. Pemerintah Jepang melihat perlunya mengembalikan perhatian internasional atas kelangsungan pembangunan Afrika (MOFA, 2016).

Selama lima tahun pertama, TICAD merupakan satu-satunya forum kerja sama dengan Afrika di kawasan Asia. Tidak mengherankan jika TICAD menandai era emas kehadiran Jepang di Afrika.

Lebih daripada itu, inisiatif Jepang tersebut mendapat sambutan baik PBB. Sejak itu, Jepang bertindak selaku tuan rumah konferensi bersama PBB, dalam hal ini *OSSA (Office of the Special Advisor on Africa)*, *United Nations Development Programme (UNDP)*, *African Union Commission (AUC)* dan *World Bank*. Akan tetapi, segala sesuatu yang terkait dengan teknis pelaksanaan dan pengorganisasian forum dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang. TICAD I hingga TICAD V dilaksanakan di Jepang. Barulah TICAD VI diagendakan di Kenya.

Dalam perkembangannya, Jepang melakukan berbagai inovasi dalam mengimplementasikan program TICAD. Menurut Obayashi (2004: 79) sebagaimana dikutip oleh Iwata (2012: 220) menyatakan bahwa TICAD lebih menekankan kepada aspek kerja sama "Selatan-Selatan." Misalnya mendukung secara finansial kerja sama antara negara-negara Asia Tenggara dan Afrika serta mempromosikan investasi dan perdagangan dari Asia Tenggara ke Afrika. Jepang menjadi fasilitator dengan berbagai komitmen bantuan pembangunan. Namun, bagi sebagian pengamat lain, TICAD dinilai lebih mencerminkan kerja sama yang dipimpin oleh Jepang sebagai negara Utara (Ogasawara, 2004: 68-70).

Sementara itu, menurut Morikawa (2000: 155) inisiasi TICAD erat kaitannya dengan isu restrukturisasi Dewan Keamanan PBB, khususnya mengenai keanggotaan tetapnya. Jepang tidak lagi mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai pendonor raksasa dan membutuhkan alat-alat kerja sama tambahan guna menjaga pengaruhnya di Afrika. Hal ini menjadi keniscayaan terkait dengan semakin meningkatkan pengaruh Tiongkok di Afrika (Alden, 2007: 110).

Dari sisi domestik Jepang, aktor utama dalam urusan kebijakan Jepang terhadap Afrika adalah para birokrat Kementerian Luar Negeri, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, dan lembaga-lembaga lain terkait dengan pengalokasian ODA (Morikawa, 2000:144). Sikap dan perilaku mereka acap kali tidak mencerminkan preferensi jangka pendek masyarakat. Akan tetapi, terbukti bahwa dalam jangka panjang agenda investasi politik berupa ODA sarat dengan kepentingan ekonomi.

Keterlibatan Jepang dalam perkembangan Afrika terbilang reaktif terhadap permintaan dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa (Morikawa, 2000: 143-144, 155). Sebagai contoh, ODA Jepang untuk Afrika pada 1980-an meningkat untuk menghindari konflik perdagangan dengan AS. Sebaliknya, kedekatan hubungannya dengan Afrika Selatan yang nyata terukur dengan peningkatan volume perdagangan 1986-1987 dikorbankan setelah mendapat kecaman AS dan Eropa.

Sementara itu, sikap perusahaan-perusahaan Jepang tampak kurang tertarik pada perekonomian di Afrika. Mereka tidak yakin akan potensi pasar Afrika dengan alasan ketidakstabilan situasi dan kondisi keamanan maupun politis (Iwata, 2012: 219). Saat perdagangan dengan Afrika meningkat dari 10.6 milyar USD pada tahun 2002 ke angka 26.4 milyar USD di tahun 2007, perusahaan-perusahaan Jepang justru enggan memperluas perdagangan dan investasi mereka di Afrika. Perdagangan Jepang dengan Afrika tersisa hanya dalam jumlah kecil, sekitar 1.5% dari total nilai perdagangan Jepang. Investasi ke Afrika juga menjadi tidak cukup aktif, hanya sekitar 0.7% dari total investasi langsung luar negeri Jepang (JETRO, 2006: 17-20). Berulang kali TICAD mengikrarkan promosi perdagangan dan promosi di Afrika, namun perusahaan-perusahaan Jepang tidak juga tergerak untuk meningkatkan bisnis mereka di sana (Morikawa: 2000, 148). Resiko keamanan dan instabilitas politis menjadi alasannya (Iwata, 2012: 219). Tren bisnis Jepang di Afrika baru mulai berubah setelah fluktuasi ekonomi di seluruh dunia pada umumnya memburuk akibat krisis *sub-prime mortgage* di AS yang berdampak luas dan disusul krisis

hutang sejumlah negara Eropa, sementara negara-negara Afrika justru mengalami perkembangan ekonomi di abad ke-21.

Dalam kasus TICAD, cakupan *stakeholders* telah meluas dari waktu ke waktu. Undangan yang disebarakan kepada semua kepala negara dan kepala pemerintahan Afrika, berbagai organisasi internasional, negara-negara donor, perusahaan swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dari Afrika, Jepang maupun negara donor mendapat tanggapan yang makin meluas (MOFA, 2016). Jumlah partisipan dan asalnya meluas, sebagaimana isu-isu pembangunan yang menjadi arus utama *Millenium Development Goals (MDGs)*.

Dengan kerangka besar pembangunan Afrika tersebut, TICAD II dihadiri peserta dari 80 negara (51 Afrika, 11 Asia, 18 Amerika Utara dan Eropa), 22 NGO, and 40 organisasi internasional (Ochiai, 2001: 37). Itu merupakan perkembangan setelah TICAD I hanya diikuti oleh 48 negara, termasuk 4 orang kepala negara, serta 12 delegasi negara pengamat dan sejumlah delegasi maupun pengamat dari organisasi internasional.

TICAD III dihadiri lebih banyak peserta. Bahkan, pada TICAD IV, 51 negara Afrika, 17 organisasi Afrika, 12 negara Asia, 22 negara donor, dan 55 organisasi internasional memenuhi undangan. Lebih dari 2500 delegasi hadir, termasuk 40 presiden dan perdana menteri Afrika. Demikian pula TICAD V yang melibatkan lebih dari 4500 peserta dari 51 negara Afrika, termasuk 39 kepala negara dan kepala pemerintahan, 31 negara mitra pembangunan dan Asia, 72 organisasi internasional and regional, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim ikut terlibat langsung di samping PM Jepang Shinzo Abe dan Menteri Luar Negeri Fumio Kishida.

Gambar 1: Pertemuan ke 5, *Tokyo International Conference for Africa's Development (TICAD)*



Sumber: http://www.mofa.go.jp/region/page2e_000002.html

Forum TICAD I (1993), TICAD II (1998) dan TICAD III (2003) dilaksanakan di Tokyo. TICAD IV (2008) dan TICAD V (2013) dilaksanakan di Yokohama sedangkan TICAD VI (2016) dilaksanakan di Kenya. Forum yang semula berlangsung lima tahun sekali tersebut mulai tahun 2016 akan dilaksanakan tiga tahun sekali. Mengakomodasi permintaan negara-negara Afrika, pertemuan puncak TICAD pun dilaksanakan bergantian di Jepang dan di Afrika.

Konferensi tersebut dilengkapi dengan agenda pertemuan tingkat tinggi, pertemuan tingkat menteri, pertemuan teknis, seminar topik pembangunan terkait *human security*, *food security*, pembangunan ekonomi, *good governance*, dan pencegahan konflik.

Adapun forum sejenis yang bersifat tahunan juga diinisiasi sebagai bagian dari African Union (AU), yaitu *Japan-African Regional Economic Communities (Japan-RECs)*. Jika dalam TICAD posisi Jepang adalah inisiator, fasilitator, dan sekaligus partisipan aktif, maka dalam forum RECs ini posisi Jepang tidak berbeda terlalu jauh. Aktivitas RECs dan TICAD menjadi saling kait dan tidak terlalu berbeda dalam hal wacana dialognya. Komitmen bantuan asing dari Jepang dan program-program pro-Afrika tetap mendominasi pembicaraan, termasuk dalam hal penanggulangan penyakit menular, riset dan teknologi budi daya pertanian, dan pembangunan infrastruktur.

TICAD dan RECs menyiratkan digunakannya kembali model tradisional dalam kerja sama, seperti pembangunan infrastruktur yang diprogramkan secara terikat dengan program pemberian bantuan.

C. India

India termasuk negara berkembang yang memiliki kapasitas dan pertumbuhan ekonomi yang besar di dunia. India termasuk dalam kelompok BRICS bersama Brasil, Rusia, RRT, dan Afrika Selatan yang diproyeksikan sebagai kekuatan ekonomi dunia di masa depan. India tidak hanya memperkuat interaksi perdagangan dengan negara-negara maju tetapi juga memberikan prioritas kerja sama dengan negara berkembang. Dalam kaitannya dengan Afrika, India bahkan telah memiliki kedekatan historis dengan benua Afrika. Perpindahan pekerja India pada jaman penjajahan menuju ke daerah selatan dan timur benua Afrika berdampak pada menyebarnya keturunan India di wilayah Afrika (Large, 2012).

India menginisiasi sebuah forum kerja sama dengan Afrika dalam *India-Africa Forum Summit (IAFS)*. Meskipun IAFS dibentuk pada tahun 2008 dan hanya diikuti oleh 14 negara perwakilan Uni Afrika, tetapi dalam perkembangannya pertemuan IAFS pada tahun 2015 dihadiri oleh 41 negara perwakilan Afrika. Dalam prosesnya, India menggunakan prinsip yang hampir sama dengan RRT. India berusaha menghormati kedaulatan negara, prinsip non-intervensi, kesetaraan dan keuntungan bersama. Dengan kata lain, pendekatan India dalam pembentukan IAFS merupakan implementasi dari kerja sama selatan-selatan antara India dengan kawasan Sub-Sahara Afrika.

IAFS adalah forum dengan pertemuan yang dilaksanakan setiap tiga atau empat tahun sekali. Dalam pelaksanaannya negara penyelenggara pertemuan atau tuan rumah forum dipilih secara bergantian antara India dan perwakilan negara Afrika. IAFS memberikan dampak signifikan dalam hubungan India-Afrika. Nilai perdagangan India dan Afrika mengalami peningkatan dari 25 milyar USD pada tahun 2007 menjadi 57 milyar USD pada tahun 2011 (Large, 2012). Pada tahun 2013, nilai perdagangan India-Afrika telah mencapai angka 67 milyar USD. Diproyeksikan nilai perdagangan India dan Afrika akan meningkat menjadi 80 milyar USD pada tahun 2020 (IDSA, 2015).

Pembentukan IAFS pada tahun 2008 merupakan langkah strategis pemerintah India. Dari sudut pandang ekspansi bisnis, menginisiasi kerja sama ekonomi dengan Afrika jelas menguntungkan. Dikarenakan India membutuhkan pasar baru di level internasional, melihat kawasan Afrika sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam

beberapa tahun terakhir menjadikan pasar Afrika potensial untuk India. Dalam periode tahun 2000 sampai 2010, enam dari sepuluh negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia berasal dari Afrika. Pertumbuhan ekonomi yang potensial di Afrika mendapatkan perhatian pemerintah India untuk melakukan diplomasi ekonomi. Sebagian besar wilayah Afrika merupakan target pasar non-tradisional bagi India.

Komoditas ekspor India dan Afrika menghasilkan perdagangan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut didasari bahwa India mengimpor minyak mentah dan barang tambang dalam skala besar, di sisi lain India mengeskpor industri otomotif, farmasi, komputer, teknologi informasi dan berbagai kebutuhan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekspor India di Afrika mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2001-2011 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,3% dari 16,8 milyar USD pada tahun 2001 menjadi 136 milyar USD pada tahun 2011 (Biswas, 2015).

Strategi India dalam IAFS menekankan pada pemberian alternatif kerja sama kepada negara-negara Afrika untuk memilih India sebagai mitra dagang mereka. Dengan menganut konsep kerja sama selatan-selatan yang mengutamakan *mutual gains* daripada *relative gains* menjadikan India dianggap bukan sebagai ancaman bagi Afrika. Sebagai contoh, adanya kecocokan dalam komoditas ekspor-impor antara India dan Afrika. Kemudian adanya aktivitas investor India di Afrika di sektor perminyakan, pertanian, teknologi informasi, dan infrastruktur komunikasi. Meskipun nilai investasi India di Afrika tidak ditemukan data secara pasti, namun diperkirakan nilai investasi India di Afrika mencapai 9,2 milyar USD. Terakhir, India melakukan pendekatan yang menghargai kedaulatan negara-negara Afrika dan memegang prinsip non-intervensi.

Pemerintah India melibatkan tiga kementerian utama dalam melakukan pendekatan diplomasi ekonomi di Afrika. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan menjadi penggerak utama diplomasi ekonomi India di Afrika. Bahkan India melibatkan departemen-departemen yang memiliki kaitan erat dengan diplomasi ekonomi seperti Departemen Industri dan Departemen Promosi Perdagangan. Koordinasi antar institusi internal India menjadi tantangan utama dalam menyelaraskan kebijakan dan arah diplomasi ekonomi India di Afrika.

D. Korea Selatan

Hubungan Korea Selatan–Afrika kurang mendapat perhatian para peneliti dibanding misalnya diskusi terkait hubungan Afrika dengan Jepang, Cina, dan India. Korea Selatan lebih identik dengan isu Reunifikasi Semenanjung Korea, Keajaiban Asia, ataupun *Hallyu* – Gelombang Korea. Dalam konteks domestik, kegelisahan Korea terletak pada fakta bahwa perubahan struktur ekonomi pasca Perang Korea dan keterbatasan sumber daya alam membuatnya kini mengimpor 90% bahan pangan, sekaligus menjadi pengimpor minyak mentah terbesar kelima, dan pengimpor gas alam keempat di dunia (Darracq & Neville, 2014). Oleh karena itu, Korea sangat berkepentingan pada isu yang nantinya termaktub dalam *Millennium Development Goals (MDGs)*, yaitu *food security* dan *energy security*.

Hubungan diplomatik Korea Selatan dengan negara-negara Afrika telah dimulai pada 1960-an. Pembukaan hubungan diplomatik menjadi bagian dari persaingannya dengan Korea Utara untuk mendapatkan pengakuan internasional dan keanggotaan di PBB. Namun, berbeda dengan RRT yang juga membutuhkan dukungan Afrika dan aktif melakukan kunjungan diplomatik, kunjungan Presiden Korea ke Afrika baru berlangsung pada era Chun Doo-hwan. Chun mengundang kepala negara Zaire dan Kenya kemudian melakukan lawatan setelah mendapat undangan resmi dari Nigeria, Gabon, Senegal, Kenya pada 1982. Berikutnya pada 2006 Presiden Roh Moo-hyun merintis ulang dengan kunjungan kenegaraan ke Mesir, Aljazair, dan Nigeria didampingi sejumlah tokoh dari *Korea Elektrik Power Corporation*, *Korea National Oil Corporation (KNOC)* dan perusahaan-perusahaan konstruksi besar (Kim, 2013).

Kunjungan tersebut dikenal membawa misi *resource diplomacy*. Dalam kunjungan tersebut diumumkan pula program *Korea Initiative for Africa's Development (KIAD)* (Kim, 2013). Dengan itulah disepakati sejumlah proyek yang didanai ODA dengan konsesi sumber daya, seperti kontrak *sharing* produksi oleh konsorsium perusahaan minyak Korea dan *Nigerian National Petroleum Corporation*. Korea juga menyatakan akan melipatgandakan ODA bagi Afrika pada tahun 2008. Kunjungan itu juga mengawali pelebagaan tiga fora kerja sama sekaligus, yaitu *Korea-Africa Forum (KAF)* dan *Korea Africa Economic Cooperation Conference (KOAFEC)*, dan *Korea-Africa Industry Cooperation Forum (KOAFIC)* (Kim, 2013). Pada tahun 2010 satu forum lagi dilembagakan, yaitu *Korea-Africa Food & Agriculture Cooperation Initiative (KAFACI)*.

Korea-Africa Forum (KAF) dirancang sebagai pertemuan tiga tahunan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Korea (MOFAT) bekerja sama

dengan Uni Afrika sebagai media diskusi para menteri luar negeri. Sementara itu *Korea-Africa Economic Cooperation Conference* (KOAPEC) dirancang sebagai pertemuan dua tahunan yang dikoordinir oleh *Ministry of Strategy and Finance* (MOSF) bekerja sama dengan African Development Bank (AfDB) dan *Korean Exim Bank* untuk mendorong kerja sama perdagangan dan ekonomi. Sementara itu, KOAFIC dirancang sebagai pertemuan tahunan sektor energi dan infrastruktur.

KAF yang pertama dihadiri lima orang kepala negara Afrika dan 15 Menteri Luar Negeri. Pada KAF II tahun 2009, Korea Selatan menyatakan untuk menggandakan ODA-nya bagi Afrika di tahun 2012, menjadi tuan rumah bagi 5000 *trainees* Afrika pada 2009-2012, dan mengirimkan 1000 relawan Korea. Deklarasi Seoul pada KAF II tersebut menegaskan *detente and mutual trust in Africa*, respek terhadap G20, dan pembangunan pembangkit nuklir di Afrika sebagai energi hijau (Iwata, 2012 :220). KAF III 2012 bahkan berhasil menarik delegasi dari 35 negara. Sementara itu KAF 2015 melibatkan lebih dari 7000 peserta.

Pelembagaan kerja sama Korea Selatan dan Afrika memberi dorongan positif pada berbagai hal yang lebih luas. Volume ODA Korea terbilang masih sangat kecil dibandingkan dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki. Nilai ODA Korea di tahun 2007 adalah 673 juta USD (hanya 16 USD perkapita, 0.07% dari GNI) dan merupakan angka terkecil di antara negara-negara anggota Development Assistance Committee (DAC) lainnya. Di tahun 2005, pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka akan meningkatkan nilai ODA mereka menjadi 0.1% dari GNI di tahun 2009 dan meningkat lagi menjadi 0.25% di tahun 2015 (Kim, 2012: 44). Ban Ki-moon, Menteri Luar Negeri Korea Selatan waktu itu yang kemudian menjadi Sekjen PBB, telah berhasil meningkatkan ekspektasi komunitas internasional terhadap peningkatan nyata dari ODA Korea.

Kerja sama dengan Afrika juga memperkuat pengelolaan ODA Korea Selatan yang dikenal dengan sistem dua pilar, yaitu oleh MOFAT melalui agensi *Korea International Cooperation Agency* (KOICA) dan oleh *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) dibentuk pada 1987 di bawah Menteri Keuangan dan Ekonomi untuk menyediakan kerja sama keuangan (Kim, 2012). Seperti negara-negara pemberi bantuan lainnya, ODA Korea ditengarai sebagai bantuan yang bersifat *highly-tied*. Proyek yang dibiayai ODA sekaligus melibatkan perusahaan konglomerat Korea Selatan (*chaebol*), seperti Samsung, Daewoo, Hyundai, dan LG dalam pelaksanaannya (Kim, 2012).

Menanggapi kritik dari dalam dan luar negeri, Pemerintah Korea telah mencoba mengurangi proporsi dari *tied projects* dengan mempopulerkan *Saemaeul Undong* (*Gerakan Kampung Baru*) kepada Afrika. “Gerakan Kampung Baru” adalah gerakan pembangunan komunitas pedesaan di Korea Selatan yang bersifat padat karya dan membangkitkan swadaya masyarakat. Dengan subsidi dan fasilitas tertentu, Saemaeul Undong terbukti menggerakkan pembangunan infrastruktur maupun ekonomi pedesaan Korea Selatan pasca Perang Korea.

Korea Selatan juga mengambil bagian dalam PKO PBB. Dengan visi *to facilitating rapid deployment to troubled areas worldwide*, Korea Selatan meningkatkan kapasitasnya untuk terlibat dalam PKO termasuk di Afrika. (Shelton, 2009: 41).

Sementara itu perdagangan antara Korea Selatan dengan Afrika tumbuh pesat. Perdagangan Korea-Afrika telah mencapai tiga kali lipat, dari 5.1 milyar USD di tahun 2007 ke angka 14.2 milyar USD pada 2010. Dalam hal perdagangan, seperti halnya Jepang, Afrika Selatan merupakan mitra dagang utama Korea Selatan di Afrika. Korea Selatan mendapatkan berbagai bahan tambang yang diperlukan untuk industrinya. Sebaliknya Afrika Selatan mendapatkan kebutuhan automotif, telefon seluler, bahan sintetis, alat berat, dan produk pelumas.

Tabel 12: Neraca Perdagangan Korea Selatan dan Afrika Selatan (Dalam USD 100 juta)

	2010	2011	2012	2013	2014
Ekspor	16.68	22.56	21.88	26.98	14.76
Impor	22.72	31.06	21.29	17.29	16.24
Neraca	-6.04	-8.5	0.59	9.69	-1.48

Sumber: World Integrated Trade Solution, World Bank (2015).

Meskipun neraca perdagangan dengan mitra dagang utama ini tampak tidak menguntungkan, namun upaya lain untuk mengatasinya tampak dari minat investasi/Penanaman Modal Asing (PMA) dan pembukaan cabang perusahaan Korea di Afrika Selatan.

Tabel 13: PMA Korea Selatan di Afrika Selatan (dalam USD 1000)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
Komitmen	16,673	32,203	75,365	5,753	8,477	5,445	143,916
Realisasi	16,566	31,504	32,806	45,353	4,118	2,022	132,369

Sumber: The Export-Import Bank of Korea

Sekitar 20 perusahaan Korea membuka cabang di Afrika Selatan, seperti *Korea Trade Promotion Corporation (KOTRA)*, *Korea Resources Corporation (KRC)*, *Korea Electric Power Corporation*, *Daewoo International*, *Samsung Electronics*, *LG Electronics*, *Samsung C&T*, *M-TEK*, *Hyundai Motor*, *CHEIL*, *POSCHROME*, *Daewoo E&C*, dan *Hyundai E&C*. Dengan berinvestasi langsung di negara tuan rumah, sebuah perusahaan multinasional dapat menghemat biaya produksi, khususnya jika terkait dengan sumber bahan baku/mentah, biaya distribusi, dan upah buruh sehingga dimungkinkan untuk mendapat margin keuntungan lebih besar.

Seperti halnya perusahaan-perusahaan India dan RRT, perusahaan-perusahaan Korea Selatan juga berminat untuk berinvestasi di bidang pertanian. Hal itu mendapat dukungan keberadaan KAFACI yang diinisiasi pemerintah Korea Selatan tahun 2010 dengan 17 anggota, yakni Angola, Cameroon, Cote d'Ivoire, Kongo, Ethiopia, Gabon, Ghana, Kenya, Malawi, Maroko, Nigeria, Senegal, Sudan, Tunisia, Uganda, Zimbabwe dan Republik Korea sendiri.

Gambar 2: Struktur Organisasi KAFACI



Sumber: <http://www.kafaci.org/about/org.asp>

KAFACI berkembang sebagai kerja sama multilateral antar-pemerintah yang berorientasi pada pengembangan produksi pangan, budi daya pertanian, industrialisasi pangan dan sektor pertanian, *sharing* pengetahuan dan informasi mengenai teknologi pertanian, namun melibatkan berbagai *stakeholders* non-pemerintah.

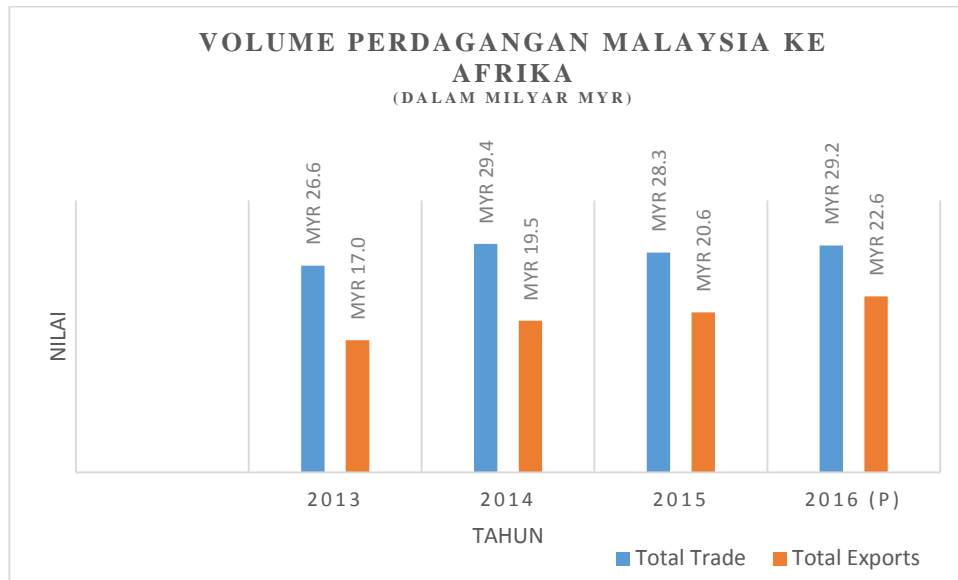
Sejak pertemuan pertama di Addis Ababa, Ethiopia, tahun 2011, KAFACI melibatkan banyak pihak dalam berbagai proyek kerja sama, *on-the-job training*, *workshop*, penelitian, seminar, konferensi dan sebagainya guna membangun jaringan produksi pangan, pertanian yang berkelanjutan, dan industrialisasi pangan dan sektor pertanian Afrika sekaligus mendorong kemitraan dan kepemimpinan dalam komunitas internasional. Berikut ini sejumlah program KAFACI:

1. Pengembangan teknologi produksi pangan dan produk pertanian, termasuk pula peternakan;
2. Pengembangan teknologi untuk kelestarian lingkungan pertanian yang berkelanjutan, dan penggunaan serta konservasi sumber daya; dan
3. *Capacity building* dan transfer teknologi pembangunan industri pertanian dan pangan melalui seminar, lokakarya, dan aneka pelatihan.

E. Malaysia

Malaysia adalah salah satu negara berkembang yang menginisiasi sebuah dialog dengan negara-negara Afrika. *Langkawi International Dialogue (LID)* dibuka pada tahun 1995 oleh Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohammad dengan tujuan untuk membuka kerja sama dengan Afrika dalam menghadapi kemiskinan. LID melibatkan berbagai kementerian terkait, pengusaha, dan institusi-institusi non-pemerintah baik Malaysia maupun negara-negara Afrika. Dalam perkembangannya Malaysia memang memiliki kepedulian dengan wilayah Afrika. Malaysia menempati peringkat 5 besar sebagai Negara tujuan studi warga Afrika. Pada tahun 2010, jumlah pelajar Afrika yang melanjutkan studi di Malaysia mengalami peningkatan signifikan dari 5373 siswa menjadi 11.825 siswa (MacPherson, 2015). Malaysia berpartisipasi dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Beberapa wilayah operasi yang sudah dilakukan pasukan perdamaian PBB yang diikuti Malaysia merupakan kawasan Afrika seperti Kongo, Liberia, Sudan, dan Afrika barat.

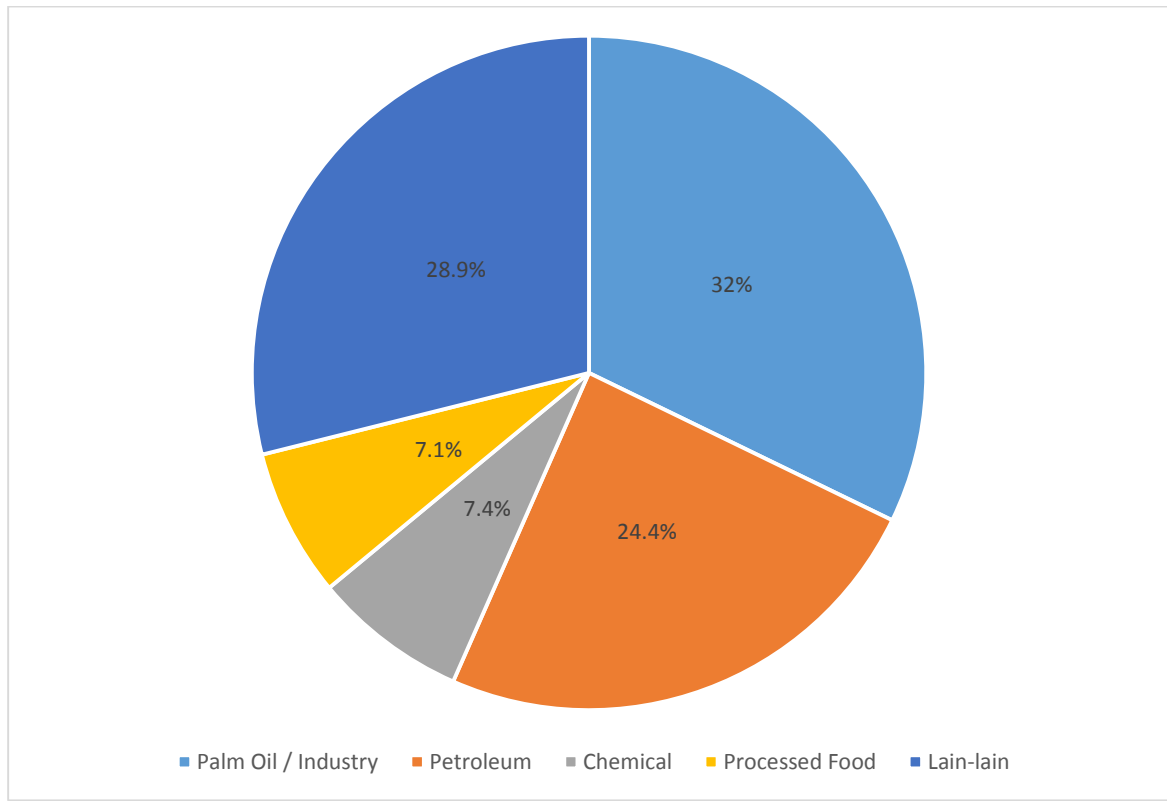
Grafik 7: Volume Perdagangan Malaysia ke Afrika



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

The Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) mencatat ekspor Malaysia ke Afrika mencapai MYR 19,5 miliar pada tahun 2014, atau meningkat sekitar 11% y-o-y. Pada tahun 2015, nilai ekspornya kembali meningkat di angka MYR 20,61 miliar atau meningkat 5,9%. Dengan mengacu pada pola 3 tahun terakhir, diproyeksikan nilai ekspor Malaysia ke Afrika mencapai MYR 22,6 miliar pada tahun 2016 (The Star, 2016). MATRADE menekankan bahwa secara umum Malaysia bekerja sama dengan semua negara potensial di kawasan Afrika. Kerja sama perdagangan yang potensial untuk ditingkatkan oleh pemerintah Malaysia adalah Afrika Selatan, Mesir, Zimbabwe, Mauritius, Aljazair, Kenya, Rwanda, Ethiopia, Nigeria, dan Ghana. Ghana memiliki posisi yang strategis dikarenakan memiliki keuntungan untuk membuka jalur perdagangan Malaysia dengan Burkina Faso, Mali, dan Niger.

Grafik 8: Komoditas Ekspor Malaysia ke Afrika tahun 2015



Sumber: The Star (2016).

Komoditas utama yang diekspor oleh Malaysia ke Afrika pada tahun 2015 masih didominasi oleh CPO (*Crude Palm Oil*) sebanyak 32%, kemudian minyak dan tambang sebesar 24,4%, bahan-bahan kimia dan makanan masing-masing sebesar 7,4% dan 7,1%. Sisanya sebesar 28,9% merupakan komoditas seperti mesin, barang elektronik, alat-alat pabrik, dan peralatan rumah tangga (The Star, 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa Malaysia bersaing hampir di semua sektor baik berupa hasil bumi dan perkebunan maupun komoditas olahan pabrik.

Investasi Malaysia di kawasan Afrika memiliki proyeksi pertumbuhan yang konsisten di angka 20% dalam dekade terakhir. Nilai *Foreign Direct Investment* (FDI) yang diberikan Malaysia di kawasan Afrika mencapai \$19,3 milyar pada tahun 2011 (MacPherson, 2015). Nilai ini menduduki peringkat ketiga di dunia, mereka hanya kalah oleh Amerika Serikat dan Prancis sebagai pemberi FDI terbesar di Afrika. Bahkan, nilai ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai \$57 milyar dalam beberapa tahun terakhir (Teoh, 2015).

Perusahaan Malaysia, Probase Manufacturing Sdn Bhd, untuk pertama kalinya menyelesaikan proyek pembangunan jalan raya di Kenya pada pertengahan 2015 senilai \$146 juta (Ghana News Agency, 2015). Proyek ini memiliki dampak yang signifikan dalam hal pembiayaan suatu proyek infrastruktur di Kenya. Dikarenakan teknologi yang digunakan oleh perusahaan Malaysia menjadikan harga mereka lebih murah dibanding nilai yang diperkirakan oleh perusahaan-perusahaan infrastruktur di Afrika (MacPherson, 2015). Maybank Bhd milik Malaysia, melakukan investasi besar ke negara-negara yang dikategorikan sebagai *Least Developed Countries (LDC)*. MayBank menjadikan negara-negara seperti Sudan dan Mozambik sebagai negara target investasi mereka (Ar, 2013). Petronas, perusahaan minyak milik Malaysia memenangkan tender eksplorasi minyak yang dilakukan oleh pemerintah Aljazair pada tahun 2014. Sebelumnya Petronas sudah aktif di negara-negara Afrika seperti Zimbabwe, Mesir dan Afrika Selatan (Ghana News Agency, 2015). Sime Darby, perusahaan Malaysia yang memiliki 220 ribu hektar lahan untuk menghasilkan CPO dan karet di Liberia pada tahun 2009. Kesepakatan ini akan berlangsung selama 63 tahun kedepan terhitung sejak disepakatinya perjanjian di tahun 2009 (Wang & Lim, 2013). Secara umum distribusi Investasi Malaysia di Afrika hampir dapat ditemukan di semua sektor. Investasi Malaysia di sektor pariwisata, perhotelan, perbankan, asuransi, pertambangan, telekomunikasi, *broadcast*, jasa ekspedisi pengiriman, perkebunan, hingga *real estate* dapat ditemukan di Afrika (Maierbrugger, 2013).

Malaysian Investment Development Authority (MIDA) merupakan salah satu aktor penting dari proses investasi Malaysia di Afrika. Awalnya MIDA adalah agensi resmi dari pemerintah Malaysia untuk mempromosikan pengembangan manufaktur dan sektor jasa di Malaysia. Dalam perkembangannya, MIDA menjadi akselerator dan pembuka jalan untuk perkembangan industri dan ekonomi Malaysia di level global. Dalam kasus Malaysia-Afrika, MIDA memahami bahwa pertumbuhan ekonomi di Afrika berkaitan dengan tantangan energi, transportasi, buruh, infrastruktur, pendidikan dan teknologi informasi. Oleh karena itu, MIDA memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam kaitannya dengan tantangan perkembangan ekonomi di kawasan Afrika.

Asia dan Afrika termasuk dua kawasan yang memiliki kesamaan dalam hal pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dari sisi historis, kedua kawasan ini memiliki ikatan senasib sebagai negara berkembang maupun sebagai negara yang pernah dijajah. Artinya, kerja sama antara Malaysia dan Afrika bisa dijadikan sebagai contoh kerja sama antar negara yang sedang berkembang. Saat ini baik Asia maupun Afrika sudah tidak lagi berjuang

melawan imperialisme melainkan bersama-sama mencoba menghadapi tantangan pembangunan ekonomi.

Pemerintah Malaysia mengadakan *Third Country Training Programme* (TCTP) untuk negara-negara Afrika. Secara spesifik TCTP adalah sebuah wadah untuk melakukan *sharing* dan transfer teknologi antara Malaysia selaku negara berkembang dengan negara di kawasan Afrika. Dalam implementasinya pemerintah Malaysia akan memberikan bantuan dan pendampingan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan negara berkembang (Teoh, 2015). Nilai FDI Malaysia yang luar biasa menjadikan Malaysia pemain penting di Afrika. Secara tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perdagangan ASEAN-Afrika. Dalam hal ini, Malaysia akan memiliki peran yang lebih dominan daripada negara-negara ASEAN yang lain, termasuk Indonesia. Dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 2015, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak secara formal mengungkapkan keinginannya untuk berkomitmen dalam kerja sama selatan-selatan. Pemerintah Malaysia memiliki ketertarikan untuk berkomitmen dalam mengeksplorasi kesempatan dan potensi di Afrika.

Penyebaran ekonomi perbankan Islam melalui "*sukuk global*" menjadi sebuah kesempatan yang dimanfaatkan pemerintah Malaysia di Afrika. Beberapa negara di kawasan Afrika mulai menerima *sukuk system* (sistem keuangan berbasis syariah) untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur mereka. Senegal bahkan memiliki ikatan pembiayaan program sukuk mencapai \$208 juta (MacPherson, 2015). Industri halal merupakan kesempatan yang dimanfaatkan oleh pemerintah Malaysia dalam melakukan kegiatan ekonomi di kawasan Afrika. Ekspor makanan Malaysia di kawasan Afrika mencapai lebih dari 7%. Hal ini dikarenakan kebutuhan industri makanan halal memang dibutuhkan beberapa negara di Afrika. Populasi penduduk muslim di kawasan Afrika akan terus mengalami peningkatan. Bahkan diproyeksikan dengan angka pertumbuhan penduduk muslim sebesar 170%, mereka akan mencapai angka 670 juta penduduk muslim pada tahun 2050 (Pew Research Center, 2015).

F. Vietnam

Vietnam dan Afrika memiliki hubungan dekat yang dibangun dari romantisme sejarah kemerdekaan dan Dasasila Bandung. Kedua pihak juga memiliki perhatian yang sama dalam transisi industrialisasi.

Struktur perekonomian Vietnam telah mengalami perubahan sejak dimulainya Program Doi Moi 1986 dan bergabungnya Vietnam ke WTO pada Januari 2007. Antara tahun 2000-2014 kontribusi sektor pertanian menurun dari 25% menjadi 18% sedangkan kontribusi sektor industri meningkat dari 36% menjadi 38%. Liberalisasi dan privatisasi juga meningkatkan partisipasi swasta sehingga output perusahaan milik negara tinggal 40% dari GDP (CIA, 2016). Vietnam juga makin dalam memasuki rezim pasar bebas dalam kerangka *ASEAN Free Trade Agreement* dan, *Trans-Pacific Partnership Agreement*, maupun *ASEAN Economic Community* dan menunjukkan komitmen sebagai perekonomian industrial yang kompetitif dan berorientasi ekspor. Oleh karena itu Vietnam aktif membuka pasar baru dan dan sumber bagi faktor produksinya.

Jauh sebelum Vietnam bergabung dengan WTO, Vietnam telah mengambil langkah untuk mengukuhkan kembali kerja sama dengan Afrika dalam kerangka Kerja sama Selatan-Selatan. Pada bulan Mei 2003 Vietnam melaksanakan *Vietnam-Africa International Forum* yang pertama. Pelembagaan kerja sama dengan Afrika tersebut segera disusul dengan pembentukan *Vietnam-Africa Friendship and Cooperation Association (VAFCA)* pada 12 November 2004 (Chi, 2015).

VAFCA dibentuk untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang bersifat *people-to-people*, dengan fokus utama pada peningkatan hubungan Vietnam-Afrika 2004-2010, sebagaimana tercantum dalam *National Action Plan* Vietnam. Pertemuan pertama VAFCA dilaksanakan 27 Mei 2005, dihadiri oleh 35 perwakilan berbagai kementerian & badan di tingkat pusat. Pertemuan pertama dilaksanakan 27 Mei 2005 dan memilih 35 perwakilan dari berbagai kementerian dan Badan di tingkat Pusat sebagai *Central Executive Committee*. Mr Hua Duc Nhi, Deputy Menteri Pertanian dan Pembangunan Desa terpilih sebagai presiden pertama asosiasi ini.

VAFCA melaksanakan berbagai aktivitas praktis yang membantu hubungan diplomatik antara bangsa Vietnam dan bangsa Afrika; mengorganisir berbagai misi diplomatik Afrika ke Vietnam, membantu mereka memahami situasi sosial ekonomi provinsi Thai Nguyen dan menyediakan berbagai info yang diperlukan, khususnya terkait dengan

area prioritas provinsi itu dan mendorong duta besar untuk menyebarluaskan informasi tersebut kepada para pebisnisnya. Asosiasi ini juga melaksanakan berbagai pertemuan dan seminar persahabatan, lomba menggambar, pameran foto, dokumentasi mengenai Afrika, dan perayaan hari jadi kemerdekaan berbagai negara Afrika.

Selain itu, VAFCA juga menyelenggarakan berbagai pertemuan yang melibatkan delegasi AU, asosiasi-asosiasi dan pemimpin Afrika dalam kunjungan singkat maupun kunjungan kerja mereka ke Vietnam. Asosiasi ini juga membina kontak intensif, proaktif, dan komunikatif dengan kedutaan-kedutaan besar negara Afrika di Vietnam untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan kedutaan tersebut.

Pada pertemuan kedua VAFCA, *Central Executive Committee* dari VAFCA dipilih dengan 32 anggota yang diketuai oleh Mr Le Duong Quang, Deputy Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam untuk periode 2013-2018.

Menurut Kementerian Industri dan Perdagangan Vietnam, nilai perdagangan bilateral antara Vietnam dan Afrika meningkat lebih dari 4.7 kali lipat dari angka 353 juta USD (2007) hingga mencapai 1.19 milyar USD (2014), terutama dengan negara-negara anggota *West African Economic and Monetary Union* (UEMOA) dan *Economic Community of Central African States* (CEMAC). Anggota-anggota UEMOA terdiri atas Ivory Coast, Benin, Burkina Faso, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, dan Togo. Ekspor impor antara Vietnam dan Afrika Barat meningkat 5 kali lipat dari 180 juta USD (2007) ke 854 juta USD (2014). Sementara anggota dari CEMAC adalah Kamerun, Republik Afrika Tengah, Kongo, Gabon, Guinea Equatorial dan Republik Chad, ekspor impor antara Vietnam dengan *Central Africa* juga mengalami peningkatan hingga 4.6 kali lipat dari 72.6 juta USD (2007) ke 340.8 juta USD (2014) (Vietrade, 2015).

Tabel 14: Perdagangan bilateral antara Vietnam dan UEMOA 2007 – 2014 (US\$juta)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ekspor Vietnam ke UEMOA	92.4	247.3	298.3	269.2	402.7	361.8	382.8	293.3
Impor Vietnam dari UEMOA	88.2	189.4	130.6	246.5	405.8	307	552.4	560.8
Total	180.6	436.7	428.9	515.7	808.5	668.8	935.2	854.1

Sumber: *General Department of Vietnam Customs*.

Tabel 15: Perdagangan bilateral antara Vietnam dan CEMAC 2007- 2014 (US\$juta).

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ekspor Vietnam ke CEMAC	37.6	80.5	70.7	79.7	139.4	94.36	153.65	64.72
Impor Vietnam dari CEMAC	27.4	67.2	68.7	94.9	127.7	122.2	155.84	276.1
Total	65	147.7	139.4	174.6	267.1	216.5	309.4	340.8

Sumber: *General Department of Vietnam Customs*.

Melihat bahwa *Vietnam-Africa International Forum II* baru dilaksanakan tahun 2010, maka bisa diduga bahwa ada hal lain selain perkara formalitas yang mendorong keberhasilan kerja sama. Ketersediaan layanan informasi bisnis melalui *Viet Nam-Africa portal gate* dan VAFCA mempunyai andil besar dalam pengembangan kerja sama bidang pertanian, perikanan, kesehatan dan pendidikan tersebut. Kerja sama Vietnam Afrika juga didukung oleh pendanaan dari organisasi internasional seperti *the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)*, mitra pembangunan seperti Perancis, Jepang melalui TICAD, dan Afrika Selatan.

Vietnam dan Afrika semakin terhubung dengan dibukanya jalur penerbangan langsung Nairobi-Hanoi oleh Kenya Airways. Mbuvi Ngunze, Managing Director Kenya Airways menyatakan, "*Vietnam is a new destination for African traders, replacing China, so this will be an attractive trade route. We see great interest on this route, especially between Angola and Vietnam because of the large labor movement,*" Diyakini pula bahwa 7 juta penduduk Hanoi dengan pendapatan perkapita US\$3000 akan memiliki kebutuhan mengeksplorasi wilayah baru bagi wisata mereka (Vietnamnet, 2015).

Kemajuan hubungan Vietnam-Afrika adalah sebuah contoh sempurna kerja sama banyak pihak, termasuk pemerintah dan birokrasinya, pihak swasta, dan akademisi (UNOHRLLS, 2010).

G. Analisis Perbandingan

Untuk mengetahui perbandingan forum kerja sama negara-negara tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 16: Perbandingan Forum Kerja Sama di Afrika

Negara	Nama Forum	Fokus/Skema Kerja Sama	Keuntungan yang diperoleh
RRT	<i>Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Prinsip non-intervensi - Pemberian bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan energi dalam negeri, - Keuntungan perdagangan - ketersediaan dukungan politik di kancah internasional,
Jepang	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tokyo International Conference for Africa's Development (TICAD)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keuntungan perdagangan - Pemasok bahan baku domestik Jepang

	- <i>Japan-African Regional Economic Communities (Japan-RECs).</i>		- Mengimbangi pengaruh Tiongkok di Afrika
India	<i>India-Africa Forum Summit (IAFS)</i>	- Prinsip non-intervensi - Pemberian bantuan	- Keuntungan perdagangan - Pemasok energi dan bahan baku domestik India
Korea Selatan	<i>Korea Initiative for Africa's Development (KIAD)</i>	- Bantuan ekonomi - Pemberdayaan masyarakat <i>Saemaeul Undong</i> (Gerakan Kampung Baru)	- Keuntungan perdagangan (pasar produk Korea) - Pemasok energi dan bahan baku domestik
Malaysia	<i>Langkawi International Dialogue (LID)</i>	- Pemberian bantuan - Transfer teknologi melalui <i>Third Country Training Programme (TCTP)</i>	- Keuntungan perdagangan - Pemasok bahan baku industri domestik - Perluasan industri halal Malaysia - Citra positif Malaysia
Vietnam	<i>Vietnam-Africa Friendship and Cooperation Association (VAFCA)</i>	- Mengutamakan <i>people-to-people contact</i> - Para pengusaha didorong lebih aktif	- Keuntungan perdagangan - Perluasan pasar di Afrika

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa enam negara yang menjadi *lesson learned* dalam kajian ini memiliki tipologi yang hampir sama namun juga memiliki kekhasan tersendiri. RRT misalnya melalui *Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC)* didukung dengan kemampuan finansial yang memadai mampu menggandeng negara Afrika secara meyakinkan. Dengan menganut prinsip non-intervensi lebih mudah diterima negara-negara Afrika. Dalam hal ini negara Afrika memandang RRT sebagai mitra dagang sekaligus menyediakan berbagai kemudahan bantuan yang sangat diperlukan untuk pembangunan Afrika. Misalnya melalui hibah, pinjaman lunak dan lain-lain. Secara tidak langsung, selain mendapat keuntungan ekonomi, citra RRT di mata negara Afrika juga semakin meningkat yang merupakan modal penting dalam forum-forum internasional.

Sedangkan langkah Jepang di Afrika yang dimulai dengan *Tokyo International Conference for Africa's Development (TICAD)*, tampaknya lebih didorong oleh kepentingan politik untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok di Afrika yang semakin meningkat. Meskipun demikian, pamor Jepang dan perusahaan-perusahaan multinasionalnya tetap menjadi

magnet negara-negara Afrika untuk menarik Jepang lebih banyak berinvestasi di Afrika. Dalam hal ini skema pemberian bantuan juga menjadi strategi Jepang di Afrika yang sangat dikenal dengan kemampuan teknologi dan inovasinya. Sementara itu, India juga hampir mirip dengan RRT. Melalui *India-Africa Forum Summit (IAFS)*, India juga dilihat negara Afrika sebagai mitra dagang. Berbeda dengan RRT, India memanfaatkan solidaritas politik, perasaan senasib sepenanggungan, saling mengakui pentingnya pemerintahan yang demokratis, hak asasi manusia, desentralisasi, institusi demokrasi parlementer, pemilihan umum dan sistem yang berkeadilan. Keuntungan India dalam aspek perdagangan sangat terlihat jelas terutama keberhasilan India memutus ketergantungan minyak dari Arab Saudi (Scroll.in 26/10/2015). Termasuk strategi India adalah pemberian fasilitas *duty free access* untuk barang-barang Afrika agar bisa masuk ke pasar India. India juga melakukan eksibisi kebudayaan dan pemberian lebih dari 50.000 beasiswa pada tahun 2015 kepada mahasiswa Afrika untuk belajar di India (Business Standard 29/10/2015).

Korea Selatan melalui *Korea Initiative for Africa's Development (KIAD)*, walaupun dengan strategi yang hampir sama, namun kerja sama Korea Selatan lebih spesifik. Misalnya pengembangan produksi pangan, budi daya pertanian, industrialisasi pangan dan teknologi pertanian, peternakan, pelatihan dan transfer teknologi. Model kemitraan juga menjadi landasan kerja sama Korea Selatan dengan Afrika. Sedangkan Malaysia melalui *Third Country Training Programme (TCTP)* juga menggunakan skema kemitraan dan pemberian bantuan sebagai fondasi kerja sama dengan negara-negara Afrika. Sebagaimana Korea, melalui TCTP Malaysia juga menggunakan skema transfer teknologi dan memberikan pendanaan pembangunan negara Afrika. Namun landasan pokok kerja sama Malaysia-Afrika adalah kerja sama Selatan-Selatan dengan memanfaatkan ikatan sejarah Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 2015. Malaysia juga diuntungkan dengan semakin meluasnya bisnis halal yang menjadi andalan negara tersebut. Adapun Vietnam melalui *Vietnam-Africa Friendship and Cooperation Association (VAFCA)* yang dibentuk tahun 2004 berhasil membangun kerja sama menguntungkan dengan Afrika. Dengan upaya diplomasi yang intensif, Vietnam mampu diterima negara Afrika sebagai mitra. Berbagai usaha dan langkah dilakukan untuk mendorong kerja sama Vietnam-Afrika yang mengutamakan strategi *people-to-people contact*. Misalnya menyediakan layanan informasi bisnis melalui *Viet Nam-Africa portal gate* termasuk menjalin kerja sama dengan badan dunia seperti *United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)*, dan juga menggandeng negara lain misalnya Perancis dan Jepang. Vietnam juga membuka pintu lebar untuk maskapai Afrika menghubungkan Afrika-Vietnam seperti Kenya Airways.

BAB V: PEMBENTUKAN FORUM KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA-AFRIKA BAGI KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA: SEBUAH ANALISIS SWOT

Setelah mengetahui analisis forum kerja sama negara-negara lain dengan negara-negara Afrika, bab ini menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT *Analysis*). Hal ini penting agar langkah-langkah kebijakan yang diformulasikan benar-benar bisa maksimal dalam implementasi dan realisasinya. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal untuk dalam mencapai tujuan tersebut. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin sebuah proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500 (Humphrey 2005). Berikut adalah analisis SWOT FKEIA.

KEKUATAN

1. Investasi politik Indonesia (Konferensi Asia Afrika tahun 1955, KTT Asia Afrika 2005, KTT Asia Afrika 2015, *New Asia Africa Strategic Partnership* 2005)
2. Indonesia dan Afrika telah memiliki hubungan sosial, budaya dan politik yang panjang dengan Afrika. Indonesia telah memiliki beberapa persetujuan dagang dengan beberapa negara Afrika (Mesir, Afrika Selatan, dll)
3. Indonesia telah memiliki mekanisme menyelesaikan berbagai persoalan dengan beberapa negara Afrika (misalnya *Joint Bilateral Commission, Egypt-Indonesia Business Forum*)
4. Indonesia memandang hubungan baik dengan beberapa negara Afrika sebagai jembatan menuju negara-negara Afrika lain, ataupun ke Eropa. (misalnya, Mesir sebagai jembatan ke negara-negara Maghribi dan Eropa. Afrika Selatan ke sub kawasan benua Afrika bagian Selatan; Nigeria pintu ke Afrika Barat dan Eropa)
5. Beberapa negara Afrika memandang Indonesia sebagai sahabat yang baik bagi upaya merekonstruksi pembangunan fisik maupun demokrasi (misalnya Mesir, Libya, dll).
6. Indonesia memiliki komoditas unggulan yang bisa ditingkatkan pemasarannya ke Afrika (tekstil, makanan/ halal food, CPO, karet, konstruksi, teknologi perminyakan, dll.).
7. Kantor Perwakilan RI di Afrika 16 KBRI dan satu KJRI dan dua *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) (Johannesburg & Lagos).

8. Dari total 54 negara kawasan Afrika Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik dengan 39 negara, serta membuka 11 perwakilan di kawasan tersebut (Supriyadi, 2012).
9. Sekitar 80 MoU Bilateral RI-negara-negara Afrika (KEMLU, 2016).
10. Status Indonesia sebagai peninjau (*observer*) di Uni Afrika.
11. Proses MoU/*Sister City* (SC):
 - SC Cirebon-Port Elizabeth (Afsel).
 - SC Kepulauan Riau-Eastern Cape (Afsel).
 - MoU *Special Economic Zone* (SEZ) *Batam Industrial Free Zone Authority* (BIFZA)-*Coega Industrial development Zone* (IDZ)
 - MoU RI- Djibouti: *Sister Port PT Pelindo II-Port of Djibouti*
 - Pembaruan MoU RI-Kenya (bidang kelautan-perikanan).

KELEMAHAN

1. Indonesia tidak memiliki informasi memadai mengenai peluang pasar di berbagai negara Afrika
2. Persepsi negatif para pengusaha/ pelaku bisnis Indonesia terhadap negara-negara Afrika yang penuh konflik dan korupsi
3. Tidak ada kemudahan ijin visa bagi pengusaha dan orang Indonesia melakukan perjalanan dan bisnis ke negara-negara Afrika
4. Negara Afrika cenderung memilih bisnis dalam skala besar
5. Perbedaan budaya dan perilaku Indonesia dengan Afrika
6. Jarak yang jauh Indonesia – Afrika tidak dilengkapi penerbangan langsung
7. Pengusaha Indonesia banyak yang masih *inward looking*.
8. Mispersepsi di Indonesia bahwa investasi adalah mendatangkan, bukan menanam ke luar negeri,
9. Sistem perbankan Indonesia belum mendukung investasi ke Afrika

PELUANG

1. Afrika berpenduduk 1,186 milyar (UN, 2015) merupakan pasar yang sangat potensial.
2. Indonesia memiliki hubungan harmonis dengan semua negara Afrika

3. Walaupun beberapa negara mengalami ketidakstabilan politik namun mereka memiliki kepentingan nasional yang tinggi dengan Indonesia (Mesir, Libya, Nigeria, dll)
4. Beberapa pasar potensial yang belum tergarap. Misalnya wisatawan Afrika, belalai gajah / tangga pesawat terbang, dll).
5. Kerja sama bidang maritim Indonesia-Afrika
6. Peluang produk Indonesia misalnya investasi bidang infrastruktur, *sunset industry* (produk Sabun B29, Wings dan produk sejenis), termasuk traktor tangan buatan Indonesia.
7. Terdapat 1,2 juta diaspora Indonesia di Afrika Selatan (Djalal, 2012).
8. *African Growth and Opportunity Act (AGOA)*

ANCAMAN

1. Kompetitor dari pemain "lama" (Amerika dan Eropa) dan pemain "baru" India, RRT, Vietnam dan Malaysia.
2. Ketidakstabilan politik Afrika
3. Birokrasi yang panjang dan korupsi di negara-negara Afrika
4. Industrialisasi Afrika tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai
5. Produk Indonesia masuk ke Afrika dikenai pajak tinggi (10 % lebih), sementara beberapa negara anggota *Commonwealth* mendapatkan berbagai fasilitas.

Setelah melakukan identifikasi berbagai faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut. Maka kemudian dibuat pemetaan analisis SWOT dengan cara membuat tabel matriks dan ditentukan sebagai tabel informasi SWOT, sebagaimana dapat disederhanakan dalam grafik berikut ini.

Grafik 9: Matriks Analisis SWOT



Model dan Grafik Analisis SWOT tersebut bermanfaat untuk melakukan identifikasi dan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang selama ini terjadi pada hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara Afrika sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

	Bermanfaat untuk mencapai sasaran	Merugikan dalam pencapaian sasaran
Faktor Internal	<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi politik Indonesia (Konferensi Asia Afrika tahun 1955, KTT Asia Afrika 2005, KTT Asia Afrika 2015, <i>New Asia Africa Strategic Partnership</i> 2005) 2. Indonesia dan Afrika telah memiliki hubungan sosial, budaya dan politik yang panjang dengan Afrika. Indonesia telah memiliki beberapa persetujuan dagang dengan beberapa negara Afrika (Mesir, Afrika Selatan, dll) 3. Indonesia telah memiliki mekanisme menyelesaikan berbagai persoalan dengan beberapa negara Afrika (misal Joint Bilateral Commission, Egypt-Indonesia Business Forum) 	<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia tidak memiliki informasi memadai mengenai peluang pasar di berbagai negara Afrika 2. Persepsi negatif Indonesia terhadap negara-negara Afrika yang penuh konflik dan korupsi 3. Tidak ada kemudahan ijin visa bagi pengusaha dan orang Indonesia melakukan perjalanan dan bisnis ke negara-negara Afrika 4. Negara Afrika cenderung memilih bisnis dalam skala besar 5. Perbedaan budaya dan perilaku Indonesia dengan Afrika 6. Jarak yang jauh Indonesia – Afrika tidak dilengkapi penerbangan langsung 7. Pengusaha Indonesia banyak yang masih inward looking.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Indonesia memandang hubungan baik dengan beberapa negara Afrika sebagai jembatan menuju negara-negara Afrika lain, ataupun ke Eropa. (Misal, Mesir sebagai jembatan ke negara-negara Maghribi dan Eropa. Afrika Selatan ke sub kawasan benua Afrika bagian Selatan; Nigeria pintu ke Afrika Barat dan Eropa) 5. Beberapa negara Afrika memandang Indonesia sebagai sahabat yang baik bagi upaya merekonstruksi pembangunan fisik maupun demokrasi (Misal Mesir, Libya, dll). 6. Indonesia memiliki komoditas unggulan yang bisa ditingkatkan pemasarannya ke Afrika (tekstil, makanan/ halal food, CPO, karet, konstruksi, teknologi perminyakan, dll). 7. Kantor Perwakilan RI di Afrika 16 KBRI dan satu KJRI dan dua <i>Indonesian Trade Promotion Center</i> (ITPC) (Johannesburg & Lagos). 8. Dari total 47 negara kawasan Afrika Sub-Sahara Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik dengan 39 negara, serta membuka 11 perwakilan di kawasan tersebut (Supriyadi, 2012). 9. Sekitar 80 MoU Bilateral RI-negara-negara Afrika (KEMLU, 2016). 10. Status Indonesia sebagai peninjau (<i>observer</i>) di Uni Afrika. 11. Proses MoU/<i>Sister City</i> (SC): <ul style="list-style-type: none"> - SC Cirebon-Port Elizabeth (Afsel). - SC Kepulauan Riau-Eastern Cape (Afsel). - MoU <i>Special Economic Zone</i> (SEZ) <i>Batam Industrial Free Zone Authority</i> (BIFZA)-<i>Coega Industrial development Zone</i> (IDZ) 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Mispersepsi di Indonesia bahwa investasi adalah mendatangkan, bukan menanam ke luar negeri, 9. Sistem perbankan Indonesia belum mendukung investasi ke Afrika
--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - MoU RI- Djibouti: <i>Sister Port</i> PT Pelindo II-Port of Djibouti - Pembaruan MoU RI-Kenya (bidang kelautan-perikanan). 	
Faktor Eksternal	Peluang <ol style="list-style-type: none"> 1. Afrika berpenduduk 1,186 milyar juta merupakan pasar yang sangat potensial. 2. Indonesia memiliki hubungan harmonis dengan semua negara Afrika 3. Walaupun beberapa negara mengalami distabilitas politik namun mereka memiliki kepentingan nasional yang tinggi dengan Indonesia (Mesir, Libya, Nigeria, dll) 4. Beberapa pasar potensial yang belum tergarap. Misalnya wisatawan Afrika, belalai gajah / tangga pesawat terbang, dll) 5. Kerja sama bidang maritim Indonesia-Afrika 6. Peluang produk Indonesia misalnya investasi bidang infrastruktur, produk Sabun B29, Wings dan produk sejenis termasuk traktor tangan buatan Indonesia. 7. Ada 1,2 juta penduduk Afrika Selatan memiliki darah Indonesia. 8. AGOA (<i>African Growth Opportunity Act</i>) 9. <i>Sunset Industries</i> 	Ancaman <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetitor dari pemain "lama" (Amerika dan Eropa) dan pemain "baru" India, RRT, Vietnam dan Malaysia. 2. Instabilitas politik Afrika 3. Birokrasi yang panjang dan korupsi di negara-negara Afrika 4. Industrialisasi Afrika tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai 5. Produk Indonesia masuk ke Afrika dikenai pajak tinggi (10 % lebih), sementara beberapa negara <i>Commonweath</i> mendapatkan berbagai fasilitas.

Setelah dilakukan perbandingan antara faktor internal yang meliputi *Strength* dan *Weakness* dengan faktor luar *Opportunity* dan *Threat*, kita bisa melakukan strategi alternatif untuk dilaksanakan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain, dengan memaksimalkan pemanfaatan kekuatan dan peluang yang ada. Misalnya:

1. Indonesia dan Afrika memaksimalkan modal sosial berupa hubungan sosial, budaya dan politik yang panjang dengan Afrika. Indonesia telah memiliki beberapa persetujuan dagang dengan beberapa negara Afrika (Mesir, Afrika Selatan, dll)

2. Indonesia memaksimalkan kepemilikan mekanisme penyelesaian berbagai persoalan dengan beberapa negara Afrika (misalnya *Joint Bilateral Commission, Egypt-Indonesia Business Forum*).
3. Indonesia memanfaatkan hubungan baik dengan beberapa negara Afrika sebagai jembatan menuju negara-negara Afrika lain, ataupun ke Eropa. (misalnya, Mesir sebagai jembatan ke negara-negara Maghribi dan Eropa. Afrika Selatan ke sub kawasan benua Afrika bagian Selatan; Nigeria pintu ke Afrika Barat dan Eropa)
4. Indonesia dapat memperbanyak kontribusinya dalam upaya merekonstruksi pembangunan fisik maupun demokrasi (misalnya Mesir, Libya, dll).
5. Indonesia perlu meningkatkan pemasaran komoditas unggulan ke Afrika (tekstil, makanan/ halal food, CPO, karet, konstruksi, teknologi perminyakan, dll).
6. Indonesia perlu memanfaatkan seluruh kantor Perwakilan RI di Afrika yang terdiri dari 16 KBRI dan satu KJRI dan dua *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) (Johannesburg & Lagos).
7. Indonesia perlu memanfaatkan sekitar 80 MoU Bilateral RI-negara-negara Afrika (KEMLU, 2016).
8. Indonesia perlu memanfaatkan status Indonesia sebagai peninjau (*observer*) di Uni Afrika.
9. Termasuk memanfaatkan Proses MoU/Sister City (SC):
 - SC Cirebon-Port Elizabeth (Afsel).
 - SC Kepulauan Riau-Eastern Cape (Afsel).
 - MoU Special Economic Zone (SEZ) Batam Industrial Free Zone Authority (BIFZA)-Coega Industrial development Zone (IDZ)
 - MoU RI- Djibouti: Sister Port PT Pelindo II-Port of Djibouti
 - Pembaruan MoU RI-Kenya (bidang kelautan-perikanan).
10. Indonesia perlu meningkatkan pemanfaatan pasar yang sangat potensial Afrika berupa penduduk sebesar 1,186 milyar.
11. Indonesia perlu memaksimalkan hubungannya yang harmonis dengan semua negara Afrika
12. Indonesia perlu meningkatkan hubungan perdagangan terhadap beberapa negara yang walau mengalami ketidakstabilan politik namun mereka memiliki kepentingan nasional yang tinggi dengan Indonesia (Mesir, Libya, Nigeria, dll)
13. Indonesia perlu menggarap beberapa pasar potensial, misalnya wisatawan Afrika, belalai gajah/tangga pesawat terbang, dll)

14. Indonesia perlu memanfaatkan semaksimal mungkin keberadaan sekitar 1,2 juta diaspora Indonesia di Afrika Selatan.
15. AGOA (*African Growth Opportunity Act*) untuk bisa masuk ke pasar Amerika Serikat dengan fasilitas bebas pajak (*duty free*).
16. *Sunset Industries*.

Setelah itu, Indonesia perlu secara bertahap memperbaiki beberapa kekurangan maupun ancaman yang ada dalam hubungan perdagangannya dengan negara-negara Afrika, antara lain sebagai berikut :

1. Indonesia perlu meningkatkan kepemilikan informasi yang memadai mengenai peluang pasar di berbagai negara Afrika
2. Indonesia perlu menghapus persepsi negatif terhadap negara-negara Afrika yang selama ini dipahaminya sebagai kawasan yang penuh konflik dan korupsi
3. Indonesia perlu memberikan kemudahan ijin visa bagi pengusaha dan orang Indonesia melakukan perjalanan dan bisnis ke negara-negara Afrika
4. Indonesia perlu memahami dan memanfaatkan kecenderungan negara Afrika memilih bisnis dalam skala besar
5. Indonesia perlu memahami perbedaan budaya dan perilaku Indonesia dengan Afrika
6. Indonesia perlu meningkatkan penerbangan langsung Indonesia dengan Afrika
7. Pengusaha Indonesia perlu meningkatkan *outward looking*.
8. Indonesia perlu memperbaiki persepsi bahwa investasi adalah bukan sekedar mendatangkan, tetapi juga menanam ke luar negeri,
9. Indonesia perlu meningkatkan sistem perbankan Indonesia supaya mendukung investasi ke Afrika
10. Indonesia perlu mencermati Kompetitor dari pemain "lama" (Amerika dan Eropa) dan pemain "baru" India, RRT, Vietnam dan Malaysia.
11. Indonesia perlu mensiasati ketidakstabilan politik Afrika dan birokrasi yang panjang dan korupsi di negara-negara Afrika
12. Indonesia perlu memperjuangkan penghapusan pajak tinggi (10 % lebih) terhadap produk Indonesia masuk ke Afrika.

BAB VI: REKOMENDASI KEBIJAKAN

A. Kesimpulan Signifikansi Pembentukan Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Afrika

Afrika merupakan benua masa depan. Dalam empat abad pasca-*renaissance*, di mana revolusi Industri menjadi motor penggeraknya telah menggerakkan perekonomian dunia. Revolusi industri telah memaksa Asia menjadi bahan baku dari proses modernisasi, melalui kebijakan kolonialisme negara Barat. Setelah benua Asia menjadi target utama laju modernisasi dunia kemudian berpindah ke kawasan Amerika Latin yang menjadi penopang ekonomi dunia, kemudian di abad ke 20, kawasan Timur tengah yang kaya akan energi menjadi tempat utama perputaran investasi internasional.

Benua Afrika secara alamiah belum banyak dieksplorasi oleh investasi internasional. Benua Afrika selama ini telah menjadi aset untuk penyediaan tenaga kerja murah untuk dikirim ke sejumlah negara di luar Afrika. Artinya benua Afrika menyimpan cadangan yang luas untuk investasi negara-negara di dunia. Sejumlah negara di Asia sedemikian rupa masif untuk membangun investasi di benua Afrika, seperti halnya RRT, India, Vietnam, Malaysia yang secara masif melakukan transformasi investasi ekonomi ke Afrika.

Pembentukan FKEIA memiliki sejumlah signifikansi:

1. Secara historis, Indonesia memiliki kedekatan relasional, di mana di penghujung Selatan Afrika, terdapat kepulauan Madagaskar yang memiliki sejumlah atribut kebudayaan dari Indonesia. Serta di penghujung utara benua Afrika, terdapat negara Mesir yang menjadi negara yang pertama kali memberikan dukungan pengakuan terhadap eksistensi kemerdekaan Indonesia.
2. Secara ekonomi, benua Afrika memiliki ruang yang sangat luas bagi transformasi pembangunan infrastruktur di banyak bidang. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibandingkan sejumlah negara, karena Indonesia memiliki kemiripan pengelolaan wilayah berbasis gurun ataupun Steppa, Sabana, maupun Indonesia memiliki sejumlah industri berbasis agraris dari sektor hulu sampai hilir, dari sektor industri pupuk, budidaya pertanian, peternakan, kehutanan sampai dengan pengelolaan hasil-hasi pertanian, peternakan, dan kehutanan.

3. Secara realitas, Indonesia telah membangun sejumlah inisiatif untuk memperkuat kerangka kerja sama bilateral dan *New Asian African Strategic Partnership (NAASP)*. Kerangka acuan besar ini harus diimplementasikan riil dengan melibatkan sejumlah *stakeholder* potensial untuk pengembangan investasi di Afrika. Sejumlah keraguan atas pengalaman buruk (*bad practices*) investasi di Afrika harus dieliminir dengan penguatan supra-struktur dan kerangka kerja normatif yang kuat dan diikuti dengan pembentukan sejumlah infra-struktur di tingkat nasional, regional maupun kemitraan di Afrika yang dapat memastikan bahwa investasi Indonesia ke Afrika adalah *visible* dan menguntungkan.

B. Langkah-langkah Pembentukan Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Afrika

Pada dasarnya sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab pembahasan, FKEIA tersebut secara khusus bertujuan untuk menyediakan informasi dan membangun jaringan mengenai peluang bisnis, investasi, dan perdagangan antara Indonesia dan Afrika. Sebagai negara penginisiasi forum, peran dan keterlibatan pemerintah Indonesia dalam forum akan sangat penting. Selain itu, koordinasi yang baik antar lembaga dan instansi terkait mutlak diperlukan. Hal ini berkaitan dengan konten kerja sama dalam forum yang bersifat teknis. Beberapa sektor kerja sama memerlukan keterlibatan langsung dari kementerian terkait sehingga mampu menghasilkan agenda-agenda yang efektif. Oleh karena itu, beberapa pandangan layak untuk dipertimbangkan dalam pembentukan forum kerja sama tersebut seperti:

- Pembentukan FKEIA akan efektif dengan menggunakan pendekatan neo-liberalisme, dibandingkan menggunakan pendekatan realisme dalam studi hubungan internasional. Pendekatan neo-liberal memberikan ruang bagi Indonesia dan negara Afrika untuk dapat memaksimalkan peluang dan peran bersama-sama, memperkuat posisi tawar Indonesia, memberikan gagasan tentang sejumlah faktor yang harus dikelola agar tercapai *integrative bargaining* dalam skema yang terukur dan menjanjikan.
- Memperluas *Indonesia-South Africa Business Forum (ISABF)*, dengan menjadikan *template* ISBAF untuk sejumlah negara di Afrika, pembuatan forum ini dipergunakan untuk membangun komunikasi antara *stakeholder* investasi Indonesia di Afrika dengan mitra investasi di Afrika. *Best practices* dari ISABF harus dikomunikasikan

secara simultan agar forum bisnis Indonesia Mesir, Aljazair, di Afrika bagian utara juga dapat terbangun.

- Membuat Konsorsium Investor Indonesia untuk Afrika, dengan mengadaptasi template MIDA (*Malaysian Investment Development Authority*). Hal ini penting untuk memutus sejumlah keraguan dari calon investor untuk masuk ke Afrika dengan memberikan ruang untuk tukar menukar informasi strategis dan teknis pengelolaan investasi secara profesional. Konsorsium ini memberikan kesempatan suatu proyek investasi dikelola secara kolektif, melalui pengakumulasian modal sosial, ekonomi, kultural. Sehingga sejumlah kemungkinan mal fungsi dari investasi dapat dihindari.
- Pada level menengah, perlu dibuat forum transformasi pengetahuan, keahlian, pembangunan yang diperuntukan untuk generasi muda di Afrika, dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan, *training*, budaya, humaniter, sebagai modal sosial untuk membangun diplomasi kebudayaan Indonesia di Afrika. Dalam konteks kompetisi memperebutkan peluang investasi Indonesia di Afrika, jelas Indonesia agak ketinggalan dibandingkan RRT, India, Vietnam, yang sudah sangat agresif di awal tahun 2000. Oleh karena itu, investasi pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada beberapa negara Afrika merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan. Harapannya, akan semakin banyak mahasiswa Afrika yang belajar dan berwisata ke Indonesia walaupun dengan biaya sendiri.

1. Bentuk Kelembagaan

Secara teknis, bentuk kelembagaan FKEIA seperti berikut:

- 1.1. Pelaksanaan *summit* FKEIA dapat dilaksanakan lima tahun sekali. Summit tersebut bisa dipertimbangkan untuk "*back-to-back*" dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika yang sangat strategis. Hal ini juga menjadi dasar kuat bahwa agenda KTT Asia-Afrika harus diteruskan walaupun terjadi pergantian pemerintahan. Komitmen tersebut akan memberikan dampak signifikan kepada implementasi agenda FKEIA di lapangan. Sebagai kontrol FKEIA, perlu diadakan pertemuan setingkat menteri yang bersifat teknis dan diadakan secara reguler setahun sekali. Pertemuan tingkat menteri lebih bersifat teknis dan menghadirkan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam implementasinya.

- 1.2. Setiap pertemuan forum dihadiri oleh pemerintah Indonesia dan semua negara di wilayah Afrika yang menjadi mitra Indonesia. Dalam setiap pertemuan forum akan menghasilkan kesepakatan, rencana kerja, dan evaluasi program yang telah selesai dilakukan. Peran pemerintah Indonesia dalam menyukseskan setiap komitmen kerja sama ekonomi dengan Afrika akan sangat ditentukan dengan keterlibatan berbagai pihak termasuk para pengusaha, korporasi, institusi pemerintah, dan perbankan. Pemerintah dalam hal ini akan berperan sebagai pihak yang melakukan promosi peluang kerja sama bisnis, konsultasi peluang bisnis, dan melakukan fasilitasi kontrak.

2. Rencana Kegiatan-Kegiatan

Rencana kegiatan FKEIA adalah seperti berikut:

2.1. Summit

Summit merupakan salah satu forum yang diadakan setelah diadakannya *Senior Official Meeting* dan *Ministerial Conferences*. Summit akan dihadiri oleh kepala negara dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pembuatan keputusan.

2.2. Ministerial Conference

FKEIA merupakan forum yang akan melibatkan berbagai kementerian terkait. Pertemuan pada level *Ministerial Conference* diharapkan dapat menghasilkan deklarasi dan *action plan* yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan forum kerjasama. Pertemuan ini dihadiri oleh menteri-menteri yang memiliki kepentingan dalam terbentuknya FKEIA seperti Kementerian Luar Negeri (sebagai koordinator) dan kementerian sektor terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang mengkoordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Perhubungan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan Kementerian Pariwisata serta Kementerian Pertanian serta perwakilan dari organisasi internasional dan regional seperti *New Asian African Strategic Partnership (NAASP)* dan *Indian Ocean Rim Association (IORA)*.

2.3. Senior Officials Meeting

Negosiasi yang berada di level ini akan menentukan jalannya kerjasama. Pertemuan yang dihadiri oleh level Direktur Jenderal ini menjadi dasar dari *Ministerial Meeting* dalam pengambilan keputusan-keputusan. Beberapa

tokoh penting yang biasanya hadir disini adalah pihak-pihak yang nantinya akan terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan. *Senior Official Meeting* menjadi langkah awal dalam persiapan pertemuan yang berada di level lebih rendah yakni *Ministerial Conference* dan *Summit*. Dihadiri oleh perwakilan kedua belah pihak yang bekerjasama, dalam hal ini Indonesia dan negara-negara partner Afrika, selanjutnya akan diadopsi sebuah *outcome* yaitu dokumen-dokumen yang akan ditindaklanjuti di level *Ministerial Conference* dan *Summit*.

2.4. Forum Bisnis

Forum bisnis ini dihadiri oleh para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang prioritas FKEIA. Sektor prioritas tersebut berdasarkan survey yang dilakukan oleh Ernst & Young Global Limited 2015 tentang potensi investasi utama di Afrika yang meliputi sektor pertanian, pertambangan, migas, pariwisata dan perhotelan, infrastruktur (tol dan pelabuhan), produk-produk olahan (makanan, minuman termasuk produk tekstil), sektor perumahan dan konstruksi, telekomunikasi, jasa keuangan dan teknologi informasi. Berdasarkan survey tersebut sektor pertanian menjadi yang paling potensial di Afrika sebesar 31,4% (Ernst & Young Global Limited, 2015).

2.5. Forum Pendukung

Forum ini melibatkan unsur-unsur pendukung yang dianggap dapat menyukseskan terselenggaranya FKEIA misalnya:

- i. Sektor perbankan - dengan dibukanya cabang perbankan nasional Indonesia di Afrika akan memudahkan berbagai transaksi bisnis dan menghindari resiko gagal bayar.
- ii. Sektor Lembaga Swadaya Masyarakat atau *NGO (Non-Governmental Organization)* – khususnya di bidang pengawasan hak investor, konsumen, dan buruh migran. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya perlindungan hak investor, konsumen, dan buruh migran.
- iii. Media – sebagai unsur pendukung publikasi dan penyebaran informasi termasuk internalisasi visi misi yang menjadi tujuan utama FKEIA.

C. Modalitas Pembentukan Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia

Untuk mewujudkan akselerasi pembentukan FKEIA, modalitas konstitusional Indonesia sudah sangat kuat, sebagaimana yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, di mana upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dapat diwujudkan dengan maksimal tatkala Indonesia memiliki inisiatif yang kuat untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai mana diketahui, Afrika sekarang ini sedang mengalami fluktuasi masalah politik dan kekerasan pasca *Arab Spring*. Afrika sejatinya membutuhkan sejumlah perhatian dari banyak negara. Yang artinya, Afrika memberikan peluang yang sangat luas kepada siapapun untuk berkontribusi dan mendapatkan keuntungan melalui investasi di Afrika. Peluang ini harus direspon dengan seksama dan terukur oleh pemerintah Indonesia, sehingga keterlibatan Indonesia dalam pembangunan FKEIA, memerlukan modalitas supra-struktur atau payung regulasi UU Hubungan Luar Negeri yang lebih progresif dan berorientasi *outward looking* untuk dapat mengelola peluang secara maksimal. UU No. 37 Tahun 1999, sepertinya kurang memadai lagi untuk mengakselerasi peran Indonesia dalam fora regional dan internasional, karena UU tersebut sangat bersifat *inward looking*. Sangat dapat dimengerti jika UU No. 37 Tahun 1999 berorientasi *inward looking* karena Indonesia sedang dalam masa transisi pemerintahan yang membutuhkan stabilitas nasional, daripada pertumbuhan ekonomi. Demikian pula dengan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Studi analisis isi terhadap UU Perjanjian Internasional Indonesia yang dilakukan oleh para peneliti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, juga menunjukkan orientasi perjanjian internasional Indonesia sangat *inward looking*. Kondisi ini menyebabkan gerak langkah, kewenangan, inisiatif yang progresif tidak terwadahi dalam supra struktur ini. Untuk itu, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap modalitas supra-struktur ini, agar melahirkan kebijakan yang progresif dan rasional.

Selain hal di atas, beberapa agenda misalnya kerja sama maritim dan beberapa kerja sama yang terjalin antara beberapa pihak harus lebih serius diperhatikan oleh pemerintah. Beberapa kerja sama tersebut misalnya terkait *sister city* dan *sister port* sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya. Di samping itu, koordinasi antar pihak terkait sangat penting untuk disinergikan agar hasil dari FKEIA bisa maksimal.

Oleh karena itu, secara spesifik penelitian ini merekomendasikan beberapa hal antara lain:

1. FKEIA melibatkan banyak pihak atau *multi-stakeholders*. Pihak-pihak tersebut adalah pihak pemerintah (Kementerian, Kedutaan Besar dan Konsulat dan para diplomatnya, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Lembaga-lembaga Penelitian yang terkait dengan diplomasi ekonomi dan lembaga-lembaga promosi ekspor), serta pelaku usaha (*business circles*) dan industri.
2. Dilihat dari peran yang dijalankan, pihak-pihak tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu kelompok pengguna jasa dan penyedia jasa. Termasuk penyedia jasa adalah Kementerian Luar Negeri dan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perhubungan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pariwisata; Kementerian Pertanian; Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN); serta kalangan peneliti/akademisi.
3. Dalam rangka menyukseskan FKEIA, penelitian mengusulkan dibentuknya unit pengelola di bawah Kementerian Luar Negeri untuk masalah bantuan luar negeri.
4. Mengintegrasikan kerja sama Selatan-Selatan dalam skema bantuan tersebut (*Aid for trade*).
5. Promosi melalui berbagai media sangat diperlukan dalam rangka menyukseskan FKEIA.
6. Perluasan jaringan ke berbagai pihak misalnya WTO, Bank Dunia dan lain-lain agar FKEIA bisa semakin kuat dan efektif.
7. Pentingnya penguatan kerja sama bidang kemaritiman Indonesia-Afrika yang selama ini kurang mendapat perhatian serius. Hal ini juga selaras dengan kebijakan Poros Maritim Dunia Presiden Joko Widodo.

DAFTAR PUSTAKA

- Alden, C. (2007). *China in Africa*. Zed Books, London.
- Ampiah, K. (1990). British Commercial Policies against Japanese Expansionism in East and West Africa, 1932-1935. *The International Journal of African Historical Studies*, 23(4), 619-641. doi:1. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/219501> doi:1
- Ar, Zurairi (2013). In Africa, Malaysia now top developing country investor, <http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/in-africa-malaysia-now-top-developing-countryinvestor#sthash.pgz8kKUc.dpuf> (diakses 18 Mei 2016).
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) (2015).
- Baine, N. & Woolcock, S. (2003). *The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiation in International Economic Relations*. London: Ashgate Publishing Ltd.
- BBC (12/5/2014). China to build new East Africa railway line. <http://www.bbc.com/news/world-africa-27368877> (diakses 17 Mei 2016).
- BBPP (2015). Penutupan Magang Petani Asia dan Afrika. Dalam <http://www.bbpp-lembang.info/index.php/arsip/berita/seputar-balai/367-penutupan-magang-petani-asia-dan-afrika> (diakses 20 Juni 2016).
- Berridge, G. R. & James, Alan (2003). *A Dictionary of Diplomacy, 2nd Edition*. New York : Palgrave Macmillan.
- Biswas, Aparajita (2015). Presentation at the Third India-Africa Strategic Dialogue, India-Africa Trade. New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses.
- Bloomberg (8/4/2016). Africa's \$30 Billion Rail Renaissance Holds Ticket for Trade. Dalam <http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-08/africa-s-30-billion-rail-renaissance-holds-ticket-for-trade>
- Brautigam, Deborah.(2011). Aid With Chinese Characteristics : Chinese Foreign Aid and Development Finance Meet the OECD-DAC Aid Regime. *Journal of International Development* 23(5): 752-64.
- Business Standard (29/10/2015). India announces \$10 bn credit for Africa. Dalam www.business-standard.com/article/economy-policy/india-announces-10-bn-credit-for-africa-115102900364_1.html
- CATAR (China Africa Trade and Economic Relationship Annual Report) (2010). Beijing: Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation.
- Chi, Q. (2016). Vietnam-Africa Friendship and Cooperation Association Promoting Relations between Vietnam and African Countries. Dalam http://vccinews.com/news_detail.asp?news_id=29435
- CIA (2016). <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html>
- CNN (16/5/2016). Kenya's \$13 billion railway project is taking shape. Dalam <http://edition.cnn.com/2016/05/15/africa/kenya-railway-east-africa/>
- Darracq, V., & Neville, D. (2014) *South Korea's Engagement in Sub-Saharan Africa: Fortune, Fuel and Frontier Markets*. London: Chatham House. Dalam

<http://www.chathamhouse.org/publication/southkorea%E2%80%99s-engagement-sub-saharan-africa-fortune-fuel-and-frontier-markets>

- Djalal, Dino Patti (2012). Diaspora Indonesia. *Kompas* 2 Juli 2012.
- Eisenman, Joshua (2007). China's Post-Cold War Strategy on Africa: Examining Beijing's Methods and Objectives," in Joshua Eisenman, Eric Heginbothman, and Derek Mitchell (eds.), *China and the Development World: Beijing's Strategy for the Twenty-First Century* pp.34.35 (Armonk, New York: M.E. Sharpe).
- Ernst & Young Global Limited (2015). EY's attractiveness survey Africa 2015: Making choices. Cape Town: EY South Africa.
- Ghana News Agency (2015). Strong leadership drives Malaysian investment in Africa, <<http://www.ghananewsagency.org/world/strong-leadership-drives-malaysian-investment-in-africa-96082>> (diakses 18 Mei 2016).
- Hasenclever, Andreas, Mayer, Peter & Rittberger, Volker (2010). *Theories of international regimes*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Hermawan, Yulius Purwadi & Kasim, Syurkani Ishak (2010). Pemenuhan Komitmen Indonesia Untuk *Overseas Development Aids (ODA)* Dalam Kerangka Kerja Sama Global. Jakarta: Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Humphrey, Albert (2005). SWOT Analysis for Management Consulting. SRI Alumni Newsletter. Menlo Park, CA: SRI International.
- Institute for Defence Studies and Analyses (2015).
- Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) (2016).
- Iwata, T. (2012). Comparative Study on "Asian" Approaches to Africa: An Introductory Reflection. *African Study Monographs*, 33 (4): 209-231.
- JETRO Economic Research Department (2006). *Japanese Trade in 2005*. Japan External Trade Organization, Tokyo.
- KEMLU (2015). Petani Afrika Mendapatkan Berbagai Ilmu Pertanian dari Indonesia. Dalam <http://www.kemlu.go.id/daressalaam/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Petani-Afrika-Mendapatkan-Berbagai-Ilmu-Pertanian-dari-Indonesia.aspx> (diakses 20 Juni 2016).
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2016).
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2016). Perdagangan dengan Mitra Non-Tradisional Khususnya di Kawasan Afrika dan Timur Tengah. Materi Presentasi. Jakarta: Direktorat Perundingan Bilateral Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Republik Indonesia.
- Kim, S. (June 2013). *Korea in Africa: A Missing Piece of the Puzzle? London School of Economics and Political Science*. London: LSE Ideas. Dalam <http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/SR016.aspx>
- Kompas, 6 Oktober 2009.

- Large, Daniel.(2012). India's African engagement. Dalam Nicholas Kitchen (eds) *Emerging powers in Africa*, LSE-IDEAS Special Report. 28-36. London: London School of Economics and Political Science.
- Lee, Donna & Hocking Brian (2010). Economic Diplomacy in Robert A. Denemark. *The International Studies Encyclopedia*, Vol II, pp 1216-1227
- MacPherson, Robert (2015). *Malaysia's Economic Push in Africa*, <<http://www.ghananewsagency.org/world/strong-leadership-drives-malaysian-investment-in-africa-96082>> (diakses 20 Mei 2016).
- Maierbrugger, Arno (2013). Malaysia tops Asia's investment in Africa, Investine,<<http://investvine.com/malaysia-tops-asias-investment-in-africa/>> (diakses 20 Mei 2016).
- Marinov, Eduard (2014). *Economic Integration Theories and the Developing Countries*. Published in: *Infusing Research and Knowledge in South-East Europe*, ed. by R. Dautov, P. Gkasis, A. Karamanos, T. Lagkas, A. Prodromidou, A. Ypsilanti No. ISBN 978-960-9416-07-8 (September 2014): pp. 164-177.
- MOFA. (2016). What is TICAD?. Retrieved from <http://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/what.html>
- MOFA. (2013). TICAD V. Retrieved from http://www.mofa.go.jp/region/page2e_000002.html
- Morikawa, J. (2000). Japan's African Diplomacy: A Critical Analysis. *International Relations*, 123: 143–160. (Japan Association of International Relations).
- Nainggolan, Poltak Partogi. (2015). Konferensi Asia Afrika, Forum Ekonomi Dunia dan Kepemimpinan Indonesia. *Info Singkat* 7(8), 5-8. Retrieved from http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-8-II-P3DI-April-2015-1.pdf
- Nester, W. (1991). Japanese Neomercantilism toward Sub-Saharan Africa. *Africa Today*, 38(3), 31-51. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/4186760>
- Obayashi, M. (2004). TICAD, un processus favorable au développement de l'Afrique. *Afrique Contemporaine*, 212: 77–89.
- Ogasawara, M. (2004). La coopération japonaise à l'égard de l'Afrique: Vers un développement de la coopération Asie-Afrique. *Afrique Contemporaine*, 212: 67–75.
- Okezone (9/9/2011). Petani RI Beri Pelatihan Petani Afrika Barat. dalam <http://economy.okezone.com/read/2011/09/09/320/500656/petani-ri-beri-pelatihan-petani-afrika-barat> (diakses 20 Juni 2016).
- Okezone, 14 Februari 2015.
- Pew Research Center.(2015). The future of world religions : Population Growth Projections, 2010-20150, Sub-Saharan Africa, <<http://www.pewforum.org/2015/04/02/sub-saharan-africa/>> (diakses 16 Mei 2016).
- Pigato, Miria & Tang, Wenxia. (2015). *China and Africa: Expanding Economic Ties in an Evolving Global Context*. Washington, DC: The World Bank. Dalam <http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20>

[Africa%20Forum/2015/investing-in-africa-forum-china-and-africa-expanding-economic-ties-in-an-evolving-global-context.pdf](#) (diakses 17 Mei 2016).

Pikiran Rakyat, 16 Mei 2016.

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia & Biro Pusat Statistik (BPS) (2015).

Rana, S. Kishan. (2007). Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries, Chapter 11. In Nicholas Bayne & Stephen Woolcock (Eds.), *The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiation in International Economic Relations, 2nd edition*. London: Ashgate.

Rana, S. Kishan (2011). The Role of Diplomacy. Dalam Kishan S. Rana and Bipul Chatterjee (eds.) *Economic Diplomacy: India's Experience*, p.3. Jaipur: Cuts International.

Republika (02/4/2016). Indonesia Beri Pelatihan Pertanian Bagi Negara Afrika. Dalam <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/02/o50dih382-indonesia-beri-pelatihan-pertanian-bagi-negara-afrika> (diakses 20 Juni 2016).

Saner, Raymond. & Yiu, Lichia (2001). *International Economic Diplomacy: Mutation in the post-modern times*. Den Haag: Netherland Institute of International Relations "Clingendael".

Satow, Ernest (1979). *Satow's Guide to Diplomatic Practice*. London: Longmans.

Scholte, J, Aart (2000). Globalisation, Governance and Corporate Citizenship, *Journal of Corporate Citizenship* 1(1): 5-23.

Scroll.in (26/10/2015). Beyond oil: India needs to reimagine its ties with Nigeria. Dalam <http://scroll.in/article/764442/beyond-oil-india-needs-to-reimagine-its-ties-with-nigeria>

Shelton, G. 2009. Korea and South Africa: Building a Strategic Partnership. Occasional Paper No.61. Pretoria: Institute for Global Dialogue

SSC-Indonesia (2015). Dalam http://ssc-indonesia.org/ksst/index88b6.html?page_id=1095#history (diakses 20 Juni 2016).

SSC-UNDP (2016). What Is South-South Cooperation?. Dalam http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html (diakses 20 Juni 2016).

Strange, Austin, Parks, Bradley, Tierney, Michael J., Fuchs, Andreas, Dreher, Axel, & Ramachandran, Vijaya. (2013) China's Development Finance to Africa: A Media-Based Approach to Data Collection. Working Paper 323 April 2013. Washington, DC: Center for Global Development.

Suara Karya, 3 April 2016.

Supriyadi, M. Wahid. (2012). Indonesia Dapat Melakukan Penetrasi Pasar Afrika, Secara Sistematis dan Berkesinambungan. *Tabloid Diplomasi Edisi Juni*.

Teoh, Philip & Kazombiaze, Whalan (2015). *Malaysian Companies making waves in Africa*, <<https://www.linkedin.com/pulse/malaysian-companies-making-waves-africa-philip-teoh>> (diakses tanggal 18 Mei 2016).

- The Star (2016), *Malaysia-Africa bilateral trade to grow 4 to 5 percents in 2016*, <<http://www.thestar.com.my/business/business-news/2016/01/22/malaysia-africa-bilateral-trade-to-grow-4-to-5pc-in-2016/>> (diakses 17 Mei 2016).
- UNHORLLS (2010). <http://unohrlls.org/meetings-conferences-and-special-events/statement-at-the-2nd-vietnam-africa-international-forum-on-vietnam-africa-cooperation-for-sustainable-development/>
- UN (2015). *World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables*. New York: United Nations.
- Vietnamnet (2015). Vietnam launches first direct air-route to Africa. Dalam <http://english.vietnamnet.vn/fms/travel/127114/vietnam-launches-first-direct-air-route-to-africa.html>
- Vietrade (2015). Africa – Potential market for both Vietnam's export and import. Dalam http://www.vietrade.gov.vn/en/index.php?option=com_content&view=article&id=2380:africa-potential-market-for-both-vietnams-export-and-import&catid=20:news&Itemid=287
- Wang, Tianyi & Lim, Andy.(2013). *Malaysia: Asia's Top Investor in Africa?*, CogitAsia, <<http://cogitasia.com/malaysia-asias-top-investor-in-africa/>> (diakses 18 Mei 2016).
- World Integrated Trade Solution, World Bank (2015). World Integrated Trade Solution Data, Export-Import. <<http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2015/TradeFlow/Export/Partner/byregion/Show/Partner%20Name;XPRT-TRD-VL;XPRT-PRTNR-SHR;/Sort/XPRT-TRD-VL>> diakses 17 Mei 2016
- Yuliantoro, Nur R.(2012). *Forum on China-Africa Cooperation(FOCAC) sebagai Bentuk Kerjasama Selatan-Selatan*, Multiversa Journal of International Studies Vol.2, No.2, Juni 2012, pp 113-123.

DAFTAR PENELITI

Peneliti Utama : Dr. Nur Azizah, M.Si.

Peneliti Anggota :
1) Dr. Ali Maksum
2) Dr. Surwandono
3) Dr. Sidik Jatmika, M.Si.
4) Drs. Djumadi Anwar, M.Si.
5) Grace Lestariana Wonoadi, S.IP.
6) Masyithoh Annisa Ramadhani, S.IP., M.A.
7) Siti Muslikhati, S.IP., M.Si.

KERJASAMA BPPK KEMENTRIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2016